



**LAPORAN AKTUALISASI  
NILAI-NILAI DASAR PNS BerAKHLAK**

**JUDUL**

**PEMANFAATAN MEDIA VIDEO DALAM  
PEMBINAAN PELAYANAN PENERBITAN KKPR  
DI WILAYAH MALUKU, NUSA TENGGARA DAN PAPUA**

**SUBDIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH IV  
DIREKTORAT SINKRONISASI PEMANFAATAN RUANG**

**Disusun Oleh:**

Nama : Taufik Hidayat, S.T.  
NIP : 19931102 202204 1 001  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Ruang

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN V ANGKATAN XXXIII  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2022**



## LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi dengan judul:

**“Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan Penerbitan KKPR di  
Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua”**

yang diajukan oleh peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022  
Gelombang V Angkatan XXXIII:

Nama : Taufik Hidayat, S.T.  
NIP : 199311022022041001  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Ruang  
Satuan/Unit Kerja : Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

disetujui dan dinyatakan layak untuk disajikan dalam Seminar Aktualisasi, sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022.

Menyetujui:

Bogor, 29 Oktober 2022

COACH

Nopy Hidayat, S.Si.  
NIP. 198111052009121002

Jakarta, 29 Oktober 2022

MENTOR

Corry Agustina, S.T., M.Sc.  
NIP. 198608252009122001

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkah dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Rancangan Aktualisasi yang berjudul “**Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan Penerbitan KKPR di Daerah**”. Rancangan Aktualisasi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan pada Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III tahun 2022 di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tulisan ini tidak dapat selesai tanpa dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung penulis selama Latsar CPNS Kementerian ATR/BPN;
2. Ibu Corry Agustina, S.T., M.Sc. selaku mentor dan Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian laporan;
3. Pak Nopy Hidayat, S.Si. selaku *coach* yang telah bersedia membimbing penulis dalam penyelesaian laporan;
4. Bu Aci Prayarani, S.T., M.T., Bu Aulia Amanda Siradj, S.T., M.T., dan Pak Didi Purwoko, S.T., M.T., selaku Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda yang telah memberikan informasi dan pemahaman mendalam mengenai isu-isu di lingkup kerja penulis;
5. May, Ferry dan Tisar yang telah memberikan pemikiran, data dan referensi isu-isu yang penulis bisa kaji dalam laporan; dan
6. Seluruh tutor pada pelatihan dasar yang telah membimbing penulis dalam memahami materi-materi dasar CPNS.
7. Iffaty Maulidina Putri yang telah membantu penulis dalam menyusun laporan dan secara umum mendukung penulis dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Aktualisasi ini tidak luput dari kekurangan, baik segi penulisan maupun substansi laporan. Penulis mengharapkan kritik dan saran atas laporan ini supaya menjadi pembelajaran penulis untuk tulisan-tulisan berikutnya. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jakarta, 29 Oktober 2022

Taufik Hidayat, S.T.  
NIP. 199311022022041001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. TUJUAN ORGANISASI.....	2
C. TUGAS DAN FUNGSI .....	3
D. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
E. PROGRAM DAN KEGIATAN SAAT INI .....	5
BAB II RANCANGAN AKTUALISASI .....	7
A. IDENTIFIKASI ISU .....	7
B. PEMILIHAN ISU .....	15
C. PENENTUAN GAGASAN PEMECAH ISU .....	16
D. RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI.....	23
E. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI.....	47
BAB III PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	49
A. ROLE MODEL.....	49
B. REALISASI KEGIATAN.....	50
C. MANFAAT AKTUALISASI.....	89
D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT REALISASI AKTUALISASI .....	89
E. TINDAK LANJUT .....	90
BAB IV.....	92
KESIMPULAN.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN .....	95
BIODATA PENULIS .....	120

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Permohonan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua .....	13
Tabel 2. 2 Kriteria Penilaian <i>Seriousness</i> .....	15
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian <i>Growth</i> .....	15
Tabel 2. 4 Hasil Analisis USG .....	16
Tabel 2. 5 Analisis SWOT .....	19
Tabel 2. 6 Penyusunan Strategi Pemecahan Masalah Menggunakan Analisis SWOT.....	20
Tabel 2. 7 Hasil Analisis Tapisan Berdasarkan Kriteria Biaya, Manfaat dan Kemudahan .....	21
Tabel 2. 8 Keterangan Kriteria Biaya, Manfaat dan Kemudahan pada Analisis Tapisan .....	21
Tabel 2.9 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi.....	23
Tabel 2.10 Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK.....	45
Tabel 2.11 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang .....	5
Gambar 2. 1 Permasalahan Pelayanan KKPR di Kabupaten Badung .....	9
Gambar 2. 2 <i>Screenshoots</i> Error Validasi KKPR .....	9
Gambar 2. 3 Data Permohonan KKPR pada Kewenangan Pemerintah Pusat .....	10
Gambar 2. 4 Ilustrasi Kesesuaian Data Pemohon dengan Pola Ruang .....	11
Gambar 2. 5 Data Permohonan KKPR secara Agregat .....	13
Gambar 2. 6 Kriteria Penilaian <i>Urgency</i> .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membentuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) profesional yang karakternya dibentuk oleh sikap dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara profesional sebagai pelayan masyarakat. CPNS diharapkan mampu menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (*habitulasi*), dan merasakan manfaat dari pelatihan sehingga terbentuk karakter PNS yang profesional sesuai bidang tugas. Dengan demikian UU ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam membentuk PNS yang profesional dan berkarakter unggul. Sejalan dengan UU ASN, Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengeluarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut dilengkapi dengan dua buah Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi, dimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14/K.1/PDP.07/2022 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

Program Pelatihan Dasar CPNS, membekali peserta melalui Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Adapun Kurikulum Pembentukan Karakter PNS terdiri dari 4 (empat) Agenda yaitu : Agenda Sikap Perilaku Bela Negara (Agenda I), Agenda Nilai-nilai Dasar PNS (Agenda II), Agenda Kedudukan dan Peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Agenda III) dan Agenda Habitulasi (Agenda IV). Selanjutnya dalam Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas, terdiri dari Kompetensi Umum/Administrasi dan Kompetensi Teknis Substantif. Sistem Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadikan peserta mampu mengaktualisasikan substansi materi pembelajaran yang telah dipelajari melalui proses pembiasaan diri yang difasilitasi dalam pembelajaran Agenda Habitulasi. Agenda Habitulasi akan berisi tentang penyusunan rencana

aktualisasi, yang mana rencana tersebut merupakan sebuah gagasan ide untuk pemecahan suatu isu ataupun permasalahan yang ada di unit kerja ataupun di lingkup jabatannya.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyusun laporan aktualisasi dengan judul “Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan KKPR di daerah”. Judul ini diambil berdasarkan proses analisis yang akan dibahas pada bab II. Pada intinya, upaya pemanfaatan media video merupakan alternatif solusi yang penulis rancang dalam menjawab tugas unit kerja penulis terhadap *constraints* yang penulis temukan dalam unit kerja, yaitu keterbatasan sumber daya waktu dan jumlah pegawai dalam melaksanakan pembinaan atau bimbingan teknis. Harapannya lewat kegiatan aktualisasi yang penulis rancang, target kegiatan pembinaan oleh unit kerja dapat terlaksana dengan baik dan tingkat pelayanan KKPR di daerah dapat meningkat.

## **B. TUJUAN ORGANISASI**

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selama lima tahun ke depan adalah Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat untuk Mendukung Tercapainya: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui dua misi dengan uraian sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan, dioperasionalkan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia, agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, serta mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran Misi, dengan target yang spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Misi Pertama yaitu Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan dilaksanakan untuk mencapai 2 Tujuan, yaitu :

1. Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat; dan

2. Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Sedangkan Misi Kedua yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia dilaksanakan untuk mencapai Tujuan yaitu : Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Sejalan dengan misi kedua Kementerian ATR/BPN yaitu Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang berstandar dunia dan tujuan turunannya, yaitu pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, kegiatan aktualisasi “Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan KKPR di daerah” dapat membantu memenuhi misi dan tujuan tersebut. Lebih jauh lagi, *outcome* dari kegiatan aktualisasi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mencapai tata ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan.

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sebagai unit organisasi yang berada dalam lingkup Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat amanat untuk menjalankan tugas berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan sinkronisasi pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis pemanfaatan ruang, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah dan pedoman bidang tata ruang dalam rangka perwujudan rencana tata ruang nasional dan daerah. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana, serta program di bidang sinkronisasi pemanfaatan ruang;
2. Penyusunan pedoman bidang pembinaan, perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang; pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, serta fasilitasi pelaksanaan kerja sama regional dalam rangka sinkronisasi program pemanfaatan ruang di tingkat nasional;
3. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah;

4. Penyusunan rekomendasi kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang; dan;
5. Pelaksanaan layanan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Secara garis besar, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang memiliki tiga sasaran kegiatan, antara lain terwujudnya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien, tersedianya NSPK bidang tata ruang, dan tersedianya rencana tata ruang daerah yang berkualitas. Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang memiliki 5 (lima) unit kerja eselon III yang terdiri atas Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah III, Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, dan Subdirektorat Pedoman Tata Ruang. Selain itu, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang juga memiliki Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Secara lebih spesifik, Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV sebagai unit kerja penulis mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan strategi sinkronisasi pemanfaatan ruang,
2. Sinkronisasi program pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan dan kawasan strategis nasional,
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah
4. Penyusunan rekomendasi program pemanfaatan ruang di wilayah Pulau Papua, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara

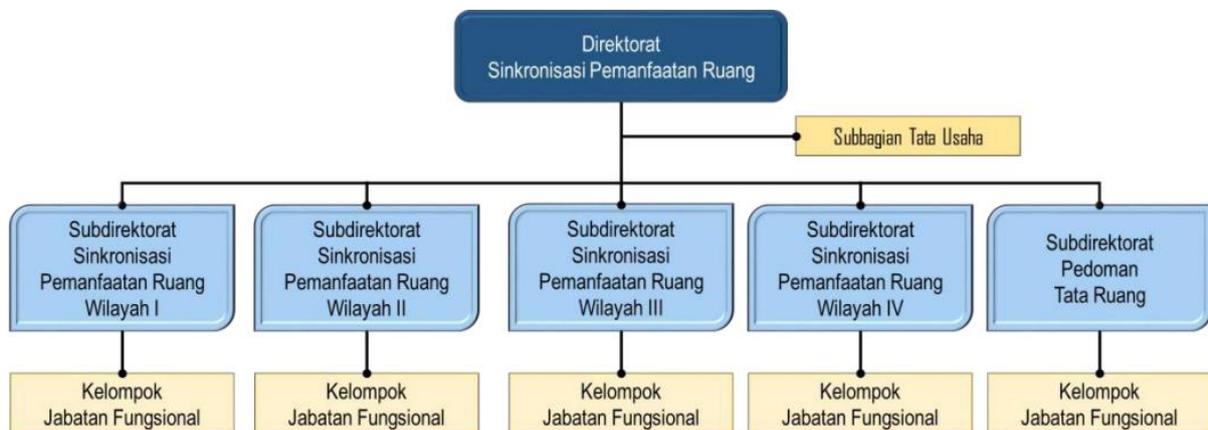
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 78 Tahun 2020, tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang, tugas pokok dari seorang Penata Ruang adalah sebagai berikut: Tugas Pokok : Melakukan kegiatan perencanaan tata ruang dan atau peninjauan kembali rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Adapun uraian tugas Penata Ruang yang berkesesuaian dengan Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang yang merupakan unit kerja penulis (unsur kegiatan pelaksanaan penataan ruang dan sub-unsur kegiatan pemanfaatan ruang) meliputi:

1. Mengumpulkan data dan informasi pemanfaatan ruang
2. Mengidentifikasi arahan pemanfaatan ruang pada dokumen rencana tata ruang
3. Melakukan monitoring program pemanfaatan ruang
4. Menyusun format program pemanfaatan ruang
5. Menyusun format sinkronisasi program pembangunan dan pemanfaatan ruang

6. Melakukan analisis data kesesuaian rencana tata ruang dalam rangka menyusun rekomendasi kesesuaian tata ruang
7. Mengevaluasi implementasi indikasi program dalam arahan pemanfaatan ruang
8. Mengkaji kesesuaian rencana tata ruang dalam arahan pemanfaatan ruang
9. Merumuskan konsep program dan pembiayaan pemanfaatan ruang dalam arahan pemanfaatan ruang
10. Melakukan sinkronisasi program strategis nasional pembangunan dan pemanfaatan ruang
11. Merumuskan rekomendasi kesesuaian tata ruang
12. Melakukan kegiatan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan pemanfaatan ruang

#### D. STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang merupakan unit kerja eselon II yang terdiri dari 5 (lima) unit kerja eselon III seperti yang telah ditulis pada subbab sebelumnya. Berikut struktur organisasi direktorat yang diilustrasikan pada bagan:



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang**

*Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, 2021*

#### E. PROGRAM DAN KEGIATAN SAAT INI

Kegiatan yang pada saat ini dilaksanakan di Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV berdasarkan DIPA dan POK Tahun Anggaran 2022 terdiri atas empat pekerjaan yang meliputi:

1. Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kepulauan Nusa Tenggara

2. Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kepulauan Maluku
3. Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau Papua
4. Penyusunan Dokumen Teknis Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang Berbasis RTR di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Pulau Papua

Berdasarkan kegiatan di Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, rancangan aktualisasi ini dapat berkontribusi pada kegiatan nomor 1 – 3 yaitu Fasilitasi Persetujuan/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Kegiatan aktualisasi penulis sejalan dengan tugas subdirektorat untuk melakukan bimbingan teknis dan bantuan teknis sinkronisasi program pemanfaatan ruang daerah.

## **BAB II**

### **RANCANGAN AKTUALISASI**

#### **A. IDENTIFIKASI ISU**

Tulisan kali ini akan membahas isu strategis yang penulis temukan di Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR) Wilayah IV (Wilayah Papua, Nusa Tenggara dan Maluku), Direktorat SPR, Direktorat Jenderal Tata Ruang yang merupakan unit kerja penulis. Subdirektorat SPR Wil. IV secara umum bertanggungjawab atas dua hal, yaitu penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR). Terkait KKPR, Kementerian ATR/BPN Pusat bertugas untuk mengurus perizinan kegiatan yang menjadi kewenangan pusat sekaligus menjadi pembina pemerintah daerah dalam penerbitan KKPR pada kewenangan daerah. Dari dua kegiatan tersebut, isu KKPR menjadi penting untuk dibahas dalam rangka menjawab amanat UUCK No.11 Tahun 2020 untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia.

KKPR secara prinsip merupakan pengganti izin lokasi sebelum adanya UUCK No.11/2020. Pada pasal 6 di undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KKPR merupakan bentuk penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang juga meliputi Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Bangunan. Pada intinya, KKPR diberikan sebagai bukti kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan RDTR. Untuk Pemerintah Daerah yang belum menyusun dan menyediakan RDTR, maka KKPR diberikan melalui persetujuan dengan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan:

1. RTRW Nasional
2. RTRW Provinsi
3. RTRW Kabupaten/Kota
4. RTR KSN
5. RZ KSNT
6. RZ Kaw
7. RTR Pulau/Kepulauan

Perizinan KKPR diberikan untuk tiga jenis kegiatan, antara lain kegiatan berusaha, kegiatan non berusaha dan kegiatan strategis nasional. Mekanisme KKPR dipersiapkan sebagai mekanisme perizinan berbasis online, namun saat ini untuk kegiatan non berusaha masih melalui perizinan manual.

Secara umum, adanya sistem KKPR ini kemudian memunculkan isu umum, yaitu soal kesiapan pemerintah dan pelaku usaha dalam melakukan adaptasi sistem izin lokasi yang baru. Dalam lingkup unit kerja penulis, secara spesifik terdapat beberapa isu yang bisa dikaji, antara lain:

### **1. Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha**

Untuk perizinan kegiatan berusaha, saat ini pemohon sudah bisa melakukan pengajuan secara daring melalui sistem OSS (*Online Single Submission*). Seluruh berkas persyaratan di konversi dalam bentuk digital. Penggunaan sistem OSS dimaksudkan untuk memudahkan pemohon dalam melakukan perizinan lokasi. Pemohon tidak perlu datang ke kantor pemerintah yang mengurus izin dan membawa banyak dokumen. Mekanisme perizinan KKPR juga menjanjikan pelayanan yang cepat. Untuk daerah dengan RDTR yang sudah terintegrasi ke sistem OSS, KKPR akan diterbitkan maksimal satu hari, sedangkan untuk daerah yang belum, KKPR dijanjikan akan terbit dalam dua puluh hari.

Adanya mekanisme perizinan baru yang berbasis online melalui KKPR tentu merupakan suatu proses perubahan sebagai inovasi kemudahan investasi berusaha. Perubahan ini membawa tantangan baru bagi pihak-pihak terkait, antara lain bagi pelaku usaha dan juga pemerintah sebagai penerbit izin. Dibalik konsep KKPR lewat sistem OSS yang baik, muncul masalah-masalah yang justru menghambat tercapainya peningkatan ekosistem investasi di lapangan.

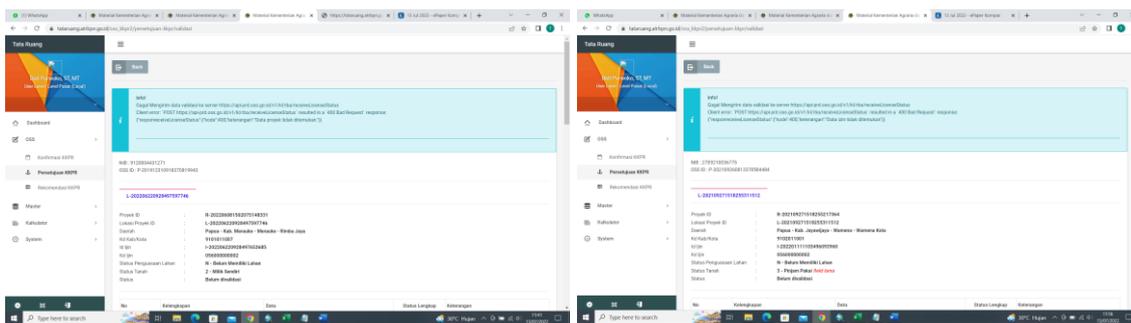
Berdasarkan hasil observasi penulis lewat rapat, diskusi dan konsultasi antara pihak Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah dan pemohon KKPR, terdapat banyak kendala teknis pada sistem OSS, antara lain lamanya proses *loading* halaman OSS, gagal mengirimkan data pemohon, atau ada tombol di sistem yang seharusnya ada namun menghilang. Sebagai ilustrasi, Pemerintah Badung sempat melakukan audiensi dengan Kantor Pusat Kementerian ATR/BPN pada tanggal 13 Juli 2022 (atas undangan surat No. 170/UND-200.11.PF.01/VII/2022) terkait sistem OSS yang banyak dikeluhkan masyarakat Kabupaten Badung. Berikut gambar yang dicuplik dari *file* presentasi:



**Gambar 2.1 Permasalahan Pelayanan KKPR di Kabupaten Badung**

Sumber: File Presentasi Pemerintah Kabupaten Badung, 2022

Selain itu, sering ditemukan eror pada sistem ketika dilakukan validasi, sehingga hasil validasi tidak bisa di proses. Berikut contoh bukti eror pada sistem yang penulis temukan:



**Gambar 2.2 Screenshots Error Validasi KKPR**

Sumber: Laman OSS Validator, 2022

Masalah teknis ini menghambat kegiatan berusaha masyarakat. Disebutkan pada kasus di Badung, bahwa Dari 160 permohonan sampai saat rapat tersebut dilaksanakan yang sudah selesai hanya satu karena permasalahan teknis seperti *error* saat validasi, tombol kirim ke *server* OSS saat pemohon membayar PNPB hilang, atau ada dokumen yang tidak berhasil diteruskan ke DPMPTSP. *Server* OSS juga tidak bisa dengan cepat memproses permohonan yang masuk ke sistem.

Masalah ini tentu utamanya akan berdampak buruk pada masyarakat karena akan mengganggu kegiatan berusaha mereka. Secara lebih luas, terhambatnya sistem OSS ini juga menghambat visi percepatan investasi di Indonesia seperti yang diamanatkan UUCK/2020. Bagi pemerintah, masalah ini akan membuat citra pemerintah menjadi buruk dan seakan tidak bisa diandalkan.

Hubungan kasus ini dengan materi agenda 3 antara lain isu ini akan menghambat fungsi ASN dalam menjadi pelayan publik. Pelayanan perizinan menjadi tidak prima dan justru menghambat. Kasus ini juga menunjukkan implementasi literasi digital pemerintah yang belum

mampu menjawab kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dilihat bahwa pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah, dalam hal ini sistem OSS, masih belum baik.

## 2. Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR kewenangan pusat yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua

Berkaitan dengan isu yang sebelumnya, penggunaan sistem OSS memberikan tantangan kepada pemerintah sebagai penerbit KKPR dan juga masyarakat sebagai pemohon kegiatan. Masyarakat memerlukan adaptasi perubahan permohonan izin lokasi dari sistem manual menuju sistem berbasis *online*. Artinya, masyarakat perlu memiliki pengetahuan mengenai mekanisme pengajuan izin lewat OSS, persyaratan administrasi yang dibutuhkan, dan juga kualitas data yang dibutuhkan agar permohonan kegiatan mereka sesuai dengan yang disyaratkan. Harapannya, masyarakat dapat beradaptasi dengan sistem perizinan yang baru dan kemudian cita-cita percepatan perizinan kegiatan berusaha dapat tercapai.

Ilustrasi dari isu ini dapat dilihat salah satunya dari permohonan kegiatan usaha untuk wilayah Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Pada tanggal 3 Agustus 2022 sudah ada 1.613 permohonan yang masuk ke sistem. Akan tetapi, jumlah permohonan yang sudah selesai baru berjumlah 9 permohonan. Sebanyak 1.049 permohonan statusnya adalah perbaikan data pada proses validasi permohonan dan sebanyak 354 permohonan sudah *expired*. Bukti data dapat dilihat pada gambar kotak dialog *validator* KKPR pada sistem OSS sebagai berikut:

Rekapitulasi Persetujuan KKPR Seluruh Provinsi Export Ms-Excel

Search Search

No	Kode	Propinsi	Total Pengajuan	Validasi Permohonan		Menunggu Pembayaran	SPS Expired	Sudah Dibayar	Sudah Bayar dan Kantah Sudah Inspektasi Lapangan	Sudah Selesai	Rata-rata waktu pengerjaan
				Belum Di Proses	Perbaikan Data						
1	5200000000	Nusa Tenggara Barat	300	93	135	1	66	1	1	3	74
2	5300000000	Nusa Tenggara Timur	421	20	307		94				
3	8100000000	Maluku	123	7	79	4	27		3	3	57
4	8200000000	Maluku Utara	239	4	177		58				
5	9100000000	Papua	324	37	210	2	72	2		1	50
6	9200000000	Papua Barat	206	22	141	4	37			2	3
#	Total		1,613	183	1,049	11	354	3	4	9	

**Gambar 2.3 Data Permohonan KKPR pada Kewenangan Pemerintah Pusat**

*Sumber: Hasil screenshot akun salah satu validator di Subdit, 2022*

Dari keterangan sebelumnya dapat dilihat bahwa hampir seluruh pemohon gagal dalam proses administrasi persyaratan perizinan KKPR. Dari pengalaman penulis dan hasil diskusi dengan *validator-validator* di Subdit, diketahui bahwa kebanyakan pemohon yang data pengajuannya ditolak atau butuh perbaikan memiliki permasalahan pada data *file* \*.shp lokasi lahan yang

dimohon dan tidak tersedianya Rencana Teknis Bangunan sebagai salah satu dokumen yang disyaratkan.

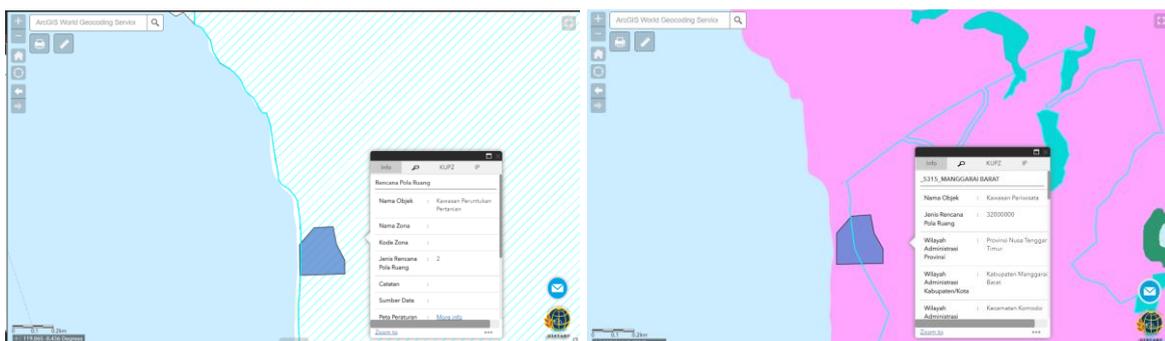
Dampak dari fenomena ini sama dengan yang tertulis untuk isu pertama, yaitu tidak terwujudnya cita-cita UUCK untuk mendorong investasi kegiatan berusaha secara umum di Indonesia, bahkan justru menghambat. Bagi masyarakat, masalah ini akan menghambat kegiatan ekonomi mereka, dan bagi pemerintah kasus ini akan memberikan citra buruk di mata masyarakat.

Keterkaitan isu ini dengan materi agenda 3 juga sama seperti penjelasan pada isu yang pertama, yaitu fungsi pemerintah sebagai pelayan masyarakat tidak berjalan baik. Selain itu, implementasi literasi digital masyarakat juga teridentifikasi masih kurang, terindikasi oleh belum baiknya masyarakat dalam memanfaatkan sistem OSS

### **3. Belum adanya penetapan standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN**

Isu berikutnya adalah soal penilaian KKPR. Seperti yang sempat dijelaskan sebelumnya bahwa tahapan mekanisme pemberian izin KKPR antara lain dimulai dari validasi, kemudian penilaian KKPR, baru setelah hasil penilaian menunjukkan kesesuaian dengan RTR, KKPR bisa terbit. Penilaian KKPR dilakukan dengan mengkaji kesesuaian jenis kegiatan yang dimohonkan dengan rencana tata ruang. Hingga laporan ini dibuat, belum ada satu kesepakatan yang pasti mengenai standar prosedur penilaian KKPR. Secara sederhana, penilaian dilakukan dengan melihat pola ruang dan Ketentuan Umum Peraturan Zonasi (KUPZ) rencana tata ruang pada level nasional sampai ke kab/kota atau kawasan (jika sudah tersedia RDTR).

Salah satu ilustrasi permasalahan pada prosedur penilaian KKPR ada pada penerapan prinsip penilaian dengan berjenjang dan komplementer. Masih ada kerancuan dalam memberikan penilaian KKPR ketika rencana tata ruang yang dijadikan acuan tidak konsisten dari rencana tata ruang pada level nasional sampai pada level daerah. Ilustrasinya bisa dilihat pada kasus salah satu pemohon di Labuan Bajo sebagai berikut:



**Gambar 2.4 Ilustrasi Kesesuaian Data Pemohon dengan Pola Ruang**

Pada gambar dapat dilihat RTRW Kab/Kota dan RTRW Pulau/Kepulauan memberikan keterangan pola ruang yang berbeda. Belum ada kesepakatan apakah akan dipilih rencana tata ruang yang lebih detil atau sebaiknya mengacu pada RTRW Pulau/Kepulauan karena produk hukumnya merupakan Perpres (memiliki hirarki hukum yang lebih tinggi).

Dampak apabila isu ini tidak diselesaikan adalah kualitas KKPR yang diterbitkan akan jadi tidak konsisten. Implikasinya adalah pembangunan daerah akan tidak konsisten mengikuti satu visi pembangunan. Lebih jauh lagi, cita-cita penataan ruang untuk membangun Indonesia secara aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan akan terhambat.

Keterkaitannya dengan materi agenda 3 tidak berbeda dengan dua isu sebelumnya, yaitu fungsi pelayanan terhadap masyarakat akan terhambat. Kemudian apabila dikaitkan dengan smart ASN, penulis belum menemukan kaitan langsung dengan isu yang dikaji karena masalah pada kasus ini adalah soal kesepakatan SOP. Mungkin hubungannya ada pada koordinasi stakeholders untuk menyusun SOP tersebut seharusnya dapat dilakukan dengan lebih mudah karena kemajuan teknologi digital pada masa sekarang.

#### **4. Belum optimalnya pelayanan penerbitan KKPR oleh pemerintah daerah di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua**

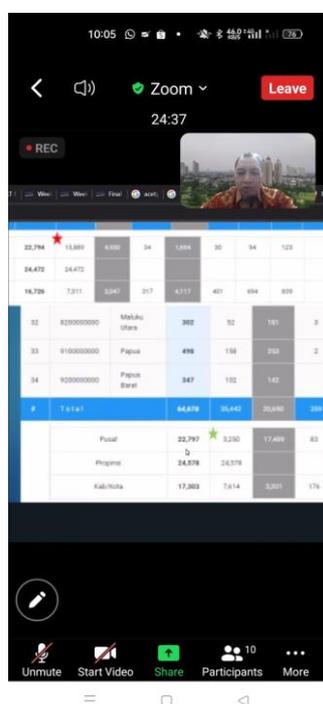
Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas masing-masing dalam mengolah permohonan KKPR tergantung jenis kegiatan yang dimohonkan, risiko kegiatan dan lokasi kegiatan. Terkait lokasi, permohonan perlu diolah oleh pemerintah pusat saat lokasi permohonan berada pada lintas provinsi. Oleh karena itu, baik pegawai pemerintah pada level pusat ataupun daerah yang bertanggungjawab atas permohonan KKPR perlu mengerti dan mampu melakukan validasi, penilaian dan penerbitan KKPR. Instansi daerah yang terlibat dalam penerbitan KKPR di daerah antara lain DPMPTSP, PUPR (atau lembaga lain yang mengurus tata ruang) dan Kantor ATR/BPN di daerah. Dari hasil wawancara dan inventarisasi data, diketahui bahwa untuk pemerintah kab/kota di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, yang sudah memiliki hak akses baru sejumlah 8%, atau 8 dari 97 daerah. OPD bidang tata ruang yang belum memiliki hak akses tidak dapat melakukan validasi KKPR. Untuk permohonan KKPR, persentase KKPR yang sudah selesai masih sangat jauh apabila dibandingkan dengan jumlah permohonan yang masuk. Berikut tabel permohonan KKPR yang masuk ke Maluku, Nusa Tenggara dan Papua yang menjadi kewenangan kab/kota per tanggal 19 Agustus 2022:

**Tabel 2.1 Data Permohonan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua**

Provinsi	Jumlah Permohonan	Sudah Selesai	Persentase
Maluku	497	0	0%
Maluku Utara	616	0	0%
Nusa Tenggara Barat	1.037	0	0%
Nusa Tenggara Timur	1.490	0	0%
Papua	1.338	0	0%
Papua Barat	763	1	0,1%
Total	5.741	1	0%

*Sumber: Hasil Olahan Data OSS, 2022*

Dapat dilihat pada data diatas bahwa di level kab/kota, sistem KKPR hampir sama sekali tidak digunakan. Selain itu, pada level makro, diketahui bahwa per tanggal 9 Agustus 2022 dari 24.578 permohonan di provinsi belum ada satu pun permohonan yang di proses, seperti yang bisa dilihat dari *screenshoot video conference* berikut:



**Gambar 2.5 Data Permohonan KKPR secara Agregat**

*Sumber: Hasil Screenshoot Zoom Meeting, 2022*

Artinya, dari data-data ini dapat dilihat bahwa implementasi sistem KKPR pada level daerah masih sangat buruk.

Terkait masalah yang sudah disebutkan sebelumnya, pemerintah pusat, khususnya Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, memiliki tanggung jawab dalam melakukan

pembinaan terhadap pemerintah daerah untuk melakukan validasi sampai penerbitan KKPR. Oleh karena itu, masalah implementasi sistem KKPR yang masih belum berjalan di daerah menjadi isu penting bagi pemerintah pusat untuk dicari jalan keluarnya. Berdasarkan hasil olahan data OSS, jumlah permohonan KKPR yang masuk ke pemerintah pusat sejumlah 1.858, sehingga persentase permohonan yang masuk ke kab/kota terhadap jumlah total (kecuali permohonan yang masuk kewenangan provinsi) adalah sebesar 75%. Dari data-data yang terkumpul, dapat dilihat bahwa pelayanan KKPR pada level kab/kota di wilayah tinjauan sangat signifikan bagi ketercapaian cita-cita UUCK secara agregat.

Untuk meningkatkan pelayanan KKPR di daerah, subdirektorat di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang melakukan pembinaan lewat bimbingan teknis (Bimtek) ke wilayah binaan tanggung jawab masing-masing. Untuk Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, menurut hasil wawancara penulis, sampai saat ini sudah dilakukan Bimtek di Jayapura, Ambon dan Lombok yang juga berupaya mengundang seluruh instansi daerah di masing-masing Pulau terkait dengan menggunakan metode *video conference*. Bimtek dilakukan secara *hybrid* dengan tatap muka langsung dan daring. Jadi, secara langsung bimtek baru dilakukan di tiga kab/kota. Bimtek ini juga belum disertai evaluasi ketercapaian materi untuk peserta, sehingga tidak diketahui sampai mana tingkat pemahaman peserta. Akan tetapi, bisa dilihat pada data KKPR yang sudah selesai di penjelasan sebelumnya, pelayanan KKPR di daerah masih jauh dari ideal. Untuk melakukan bimtek secara langsung, sumber daya manusia di subdirektorat masih sangat terbatas. Setelah dikurangi kab/kota yang telah dikunjungi, masih ada 93 kab/kota yang belum dibina secara langsung, sedangkan jumlah KKPR yang perlu dikelola total sudah di atas angka 5.000 dan akan terus bertambah. Jumlah sumber daya manusia di subdirektorat saat ini ada 10 orang dengan 8 tenaga teknis, antara lain 1 Kepala Subdirektorat, 3 orang ASN ahli penata ruang muda, 3 orang tenaga ahli, 1 sekretaris, 1 bendahara dan 1 penata ruang pertama, sehingga beban pembinaan langsung dengan ketersediaan sumber daya manusia timpang.

Data yang terkumpul menunjukkan implementasi KKPR di daerah masih jauh dari harapan. Dampaknya, percepatan pembangunan dan investasi yang dicita-citakan UUCK akan sulit tercapai. Pemerintah kab/kota perlu diberi pengertian dan pengetahuan tentang KKPR. Apabila tidak cepat teratasi, permohonan KKPR akan menumpuk dan kemungkinan akan sulit diproses dengan baik di masa yang akan datang.

Isu ini dapat dihubungkan dengan fungsi ASN sebagai pelayan masyarakat. Dengan kondisi daerah yang masih belum bisa mengelola permohonan KKPR dengan baik, masyarakat yang ingin mengajukan izin berusaha akan terhambat urusannya.

## B. PEMILIHAN ISU

Dari ketiga isu tersebut kemudian dipilih isu yang paling strategis dengan menggunakan analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*). Berikut penjelasan skala likert untuk masing-masing kriteria penilaian:

**Tabel 2.2 Kriteria Penilaian *Urgency***

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
4	Mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
3	Cukup mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
2	Kurang mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
1	Tidak mendesak	Harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun

**Tabel 2.3 Kriteria Penilaian *Seriousness***

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat serius	Dampak isu akan sangat berpengaruh pada instansi dan pihak lain/masyarakat
4	Serius	Dampak isu akan berpengaruh pada instansi dan pihak lain/masyarakat
3	Cukup serius	Dampak isu cukup berpengaruh pada instansi dan pihak lain/masyarakat
2	Kurang serius	Dampak isu kurang berpengaruh pada instansi dan pihak lain/masyarakat
1	Tidak serius	Dampak isu tidak berpengaruh pada instansi dan pihak lain/masyarakat

**Tabel 2.4 Kriteria Penilaian *Growth***

Nilai	Indikator	Deskripsi Indikator
5	Sangat cepat memburuk	Memburuk dalam waktu 1 bulan
4	Cepat memburuk	Memburuk dalam waktu 3 bulan
3	Cukup cepat memburuk	Memburuk dalam waktu 6 bulan
2	Kurang cepat memburuk	Memburuk dalam waktu 1 tahun
1	Tidak cepat memburuk	Memburuk dalam waktu > 1 tahun

Penilaian dilakukan dengan mengolah data angket yang disebar ke tiga responden, antara lain:

1. Einstein Al Makarima Mohammad, S.T., M.T., M.Sc.  
Jabatan: Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR) Wilayah IV
2. Aci Prayarani, S.T., M.T.  
Jabatan: Koordinator SPR Wilayah IV (Penata Ruang Muda)
3. May Arista Hasibuan, S.PWK  
Jabatan: Konsultan Individu SPR Wilayah IV

Berikut hasil analisis USG berdasarkan olahan data dari responden:

**Tabel 2.5 Hasil Analisis USG**

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth	Jumlah	Peringkat
1	Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha	3	3	2	8	3
2	Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	4	4	4	11	2
3	Belum adanya standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN	1	3	2	6	4
4	Belum optimalnya pelayanan penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	5	4	4	14	1

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

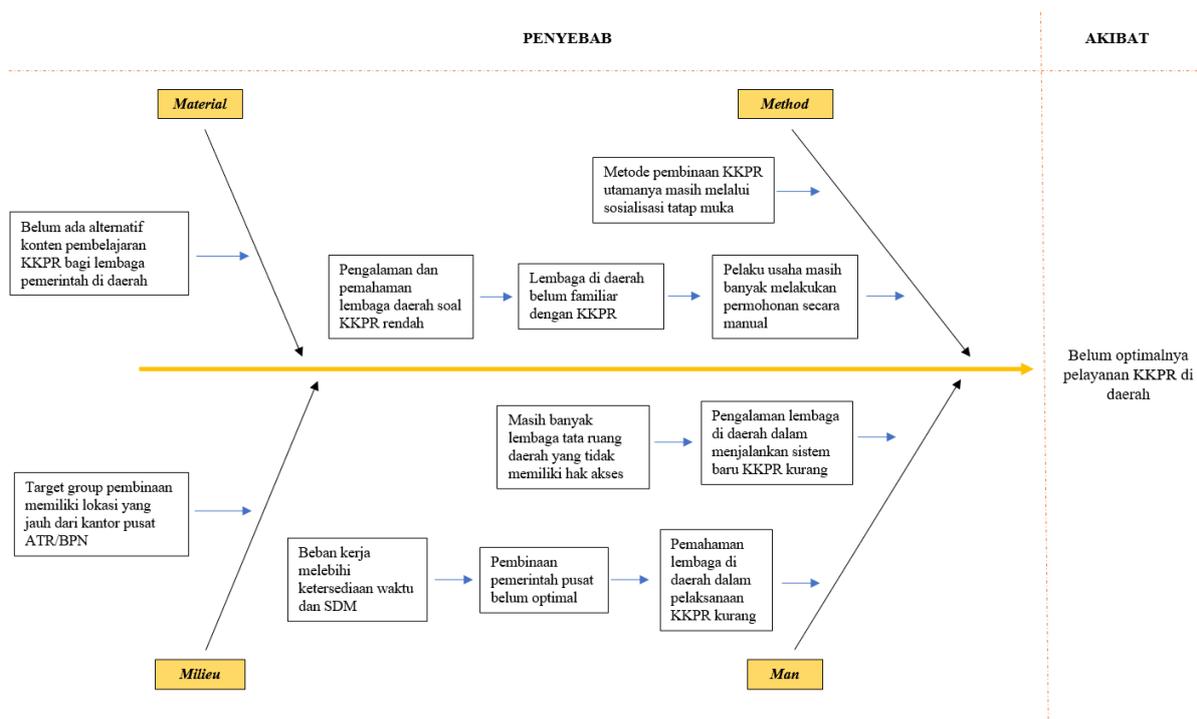
Dari hasil analisis USG, dapat dilihat bahwa isu ke-4 merupakan isu yang paling strategis diantara tiga lainnya. Akan tetapi, pada dasarnya keempat isu ini saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan isu yang harus diselesaikan bersama. Hasil ini juga berkaitan dengan fakta jumlah KKPR yang masuk ke daerah apabila dibandingkan secara agregat jauh lebih banyak dibanding KKPR yang masuk pada kewenangan pusat. Dengan demikian, jumlah investasi yang masuk kemungkinan besar akan lebih banyak apabila isu ini dapat terselesaikan. Selain itu juga apabila dibandingkan dengan tiga isu lainnya, pembinaan KKPR di daerah murni merupakan tugas masing-masing Subdit dalam Direktorat SPR tergantung pada wilayah tanggung jawab masing-masing. Tiga isu lainnya dapat diselesaikan secara menyeluruh apabila dilakukan dengan kolaborasi minimal antar subdirektorat.

### **C. PENENTUAN GAGASAN PEMECAH ISU**

Untuk dapat mengetahui akar permasalahan isu strategis yang ditemukan, penulis melakukan analisis tapanis isu menggunakan teknik analisis fishbone. Pada analisis ini penulis melakukan eksplorasi penyebab isu pada empat kategori utama (4M), antara lain:

1. *Man* (sumber daya manusia yaitu pegawai Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV dan lembaga pemerintah di Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang bertanggung jawab atas penerbitan KKPR di daerah)
2. *Material* (bahan-bahan pendukung pelaksanaan pembinaan penerbitan KKPR kepada lembaga di daerah)
3. *Method* (metode atau proses kegiatan pembinaan kepada lembaga-lembaga terkait di daerah)
4. *Milieu* (kondisi eksternal, keadaan atau kondisi yang dinilai dapat mempengaruhi proses pembinaan kepada lembaga di daerah)

Berikut gambar analisis *fishbone* yang penulis susun:



**Gambar 2. 6 Analisis *Fishbone* Penyebab dan Akibat Isu Prioritas**

Dari deskripsi isu pada subbab identifikasi isu, belum optimalnya pelayanan KKPR di daerah dapat terindikasikan dari jumlah pemerintah daerah yang sudah memiliki hak akses, permohonan KKPR yang masuk sistem OSS dan permohonan yang telah diolah oleh *validator* (pemerintah daerah). Berkaitan dengan isu ini, pemerintah pusat memiliki tugas untuk melakukan pembinaan ke daerah. Pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengurus permohonan KKPR pada kewenangan daerah dengan demikian merupakan juga tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN. Upaya pembinaan yang dilakukan sampai saat ini utamanya baru berupa bimtek secara langsung ke daerah

(disertai undangan *zoom*). Bentuk bimtek ini berupa seminar dan diskusi selama satu hari. Seperti yang sempat dibahas pada subbab identifikasi isu, Subdirektorat SPR IV sudah melakukan bimtek tatap muka sebanyak tiga kali. Pada kesempatan bimtek-bimtek tersebut, pihak subdirektorat sudah mencoba mengundang seluruh pemerintah daerah terkait yang ada di satu pulau yang sama untuk mengikuti *video conference*. Akan tetapi, metode ini tidak efektif. Dapat dilihat dari situasi di daerah-daerah tinjauan sekarang yang hampir sama sekali tidak memanfaatkan sistem KKPR. Dari analisis *fishbone*, kesimpulan yang penulis ambil adalah hubungan antara **target pembinaan, ketersediaan sumber daya untuk pembinaan dan metode pembinaan kurang sesuai**. Dibutuhkan metode pembinaan alternatif yang dapat menjadi upaya komplementer untuk mengakomodasi upaya pencapaian target pembinaan dengan sumber daya yang terbatas.

Dari akar permasalahan tersebut, berikutnya penulis merumuskan strategi solusi pemecahan masalah dengan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik analisis untuk merumuskan strategi atas suatu kondisi dengan pertimbangan *Strength* (kekuatan/kelebihan) dan *Weakness* (Kelemahan) yang merupakan kondisi internal serta *Opportunity* (peluang) dan *Threat* (ancaman) yang merupakan kondisi eksternal. Berikut tabel SWOT yang telah disusun terhadap pelayanan KKPR di daerah:

**Tabel 2.6 Analisis SWOT**

<i><b>Strength</b></i>	<i><b>Weakness</b></i>	<i><b>Opportunity</b></i>	<i><b>Threat</b></i>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman anggota subdirektorat atas KKPR sudah baik</li> <li>2. Ketersediaan sarana pendukung penyusunan konten sosialisasi digital</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewenangan penulis yang terbatas</li> <li>2. Jumlah SDM di unit kerja untuk melakukan pembinaan tatap muka terbatas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan internet</li> <li>2. Ketersediaan laptop/ komputer dan gawai di wilayah target</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurangnya pemahaman lembaga pemerintah di daerah atas KKPR</li> <li>2. Banyaknya lembaga pemerintahan di daerah yang belum memiliki hak akses</li> <li>3. Jarak wilayah target yang jauh dari kantor pusat ATR/BPN</li> <li>4. Jumlah permohonan KKPR yang berpotensi terus bertambah</li> <li>5. Aturan pelarangan penerbitan izin lokasi selain KKPR</li> </ol>

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Dari tabel S-W-O-T diatas, kemudian dibuat tabel strategi yang menggabungkan dua komponen, antara lain strategi SO, strategi WO, strategi ST dan strategi WT. Berikut tabel yang telah disusun:

**Tabel 2.7 Penyusunan Strategi Pemecahan Masalah Menggunakan Analisis SWOT**

<b>Strategi SO</b>	<b>Strategi WO</b>	<b>Strategi ST</b>	<b>Strategi WT</b>
Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di daerah (S1, S2, O1, O2)	Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di daerah (W1, W2, O1, O2)	Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di daerah (S1, S2, T1, T3, T4, T5)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan konten digital dalam sosialisasi pemanfaatan penerbitan KKPR bagi pemerintah di daerah (W1, W2, T1, T3, T4, T5)</li> <li>2. Penambahan jumlah sumber daya manusia untuk mendukung sosialisasi tatap muka langsung (W2, T1, T4, T5)</li> <li>3. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi KKPR ke kelompok target (W1, W2, T1, T3, T4, T5)</li> </ol>

*Sumber: Hasil Analisis, 2022*

Dari tabel diatas, terdapat tiga strategi pemecahan isu, yaitu:

1. Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di daerah
2. Penambahan jumlah sumber daya manusia untuk mendukung sosialisasi tatap muka langsung
3. Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi KKPR ke kelompok target

Dari ketiga solusi hasil analisis, dipilih satu solusi yang dianggap paling baik untuk dilaksanakan. Apabila dilihat dari komprehensivitas gagasan terhadap pemanfaatan potensi dan pemecahan masalah, maka gagasan pertama merupakan gagasan yang paling cocok untuk diimplementasikan, yaitu “Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di daerah”. Kemudian, apabila disesuaikan dengan lokus isu, maka kalimat gagasan yang dipakai adalah **“Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua”**. Untuk memperkuat proses pemilihan isu, berikut penulis buat perbandingan masing-masing isu berdasarkan kriteria *Biaya (B)*, *Manfaat (M)* dan *Kemudahan (K)*. Masing-masing aspek akan diberi skor menggunakan skala *likert* 1-5 dengan interpretasi skor antara lain 1 untuk penilaian yang paling buruk dan 5 yang paling baik. Berikut hasil analisis penulis:

**Tabel 2.8 Hasil Analisis Tapisan Berdasarkan Kriteria Biaya, Manfaat dan Kemudahan**

No	Gagasan Pemecah Isu	Indikator			Jumlah	Peringkat
		B	M	K		
1	Pemanfaatan konten digital dalam pembinaan pelayanan penerbitan KKPR bagi pemerintah di daerah	5	4	4	13	1
2	Penambahan jumlah sumber daya manusia untuk mendukung sosialisasi tatap muka langsung	2	5	3	10	2
3	Menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan sosialisasi KKPR ke kelompok target	2	3	3	8	3

Sumber: Hasil Analisis, 2022

**Tabel 2.9 Keterangan Kriteria Biaya, Manfaat dan Kemudahan pada Analisis Tapisan**

Nilai	Keterangan		
	Biaya	Manfaat	Kemudahan
5	Tidak mengeluarkan biaya sedikitpun	Sangat berhasil guna, efektif dan untuk jangka panjang	Sangat mudah untuk dilakukan dan fasilitas/sarana tersedia
4	Biaya yang dikeluarkan kecil	Berhasil guna, efektif dan untuk jangka panjang	Mudah untuk dilakukan dan fasilitas/sarana tersedia
3	Biaya yang dikeluarkan sedang	Cukup berhasil guna dan efektif tetapi untuk jangka pendek	Cukup sulit untuk dilakukan tetapi fasilitas/sarana tersedia
2	Biaya yang dikeluarkan besar	Kurang berhasil guna, kurang efektif dan untuk jangka pendek	Sulit untuk dilakukan dan fasilitas/sarana tidak tersedia
1	Biaya yang dikeluarkan sangat besar	Tidak berhasil guna dan tidak efektif	Tidak dapat dilakukan dan fasilitas/sarana tidak tersedia

Berdasarkan ketiga kriteria diatas, penulis menyimpulkan bahwa gagasan **“Pemanfaatan Konten Digital dalam Pembinaan Pelayanan Penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua”** merupakan pilihan paling baik diantara dua isu yang lain. Gagasan konten digital ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, namun pada rancangan kali ini konten digital yang akan dibuat adalah video agar konten pembinaan lebih menarik dan mudah disebar.

Gagasan ini diimplementasikan dengan lima kegiatan, antara lain:

1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah, dengan tahapan:
  - a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR
  - b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan
  - c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah
  - d. Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan
2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah, dengan tahapan:
  - a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR
  - b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan
  - c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah
  - d. Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan
3. Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah, dengan tahapan:
  - a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR
  - b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan
  - c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah
  - d. Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan
4. Pembuatan konten digital berupa video untuk pembinaan, dengan tahapan:
  - a. Reduksi informasi untuk dimasukan ke konten digital
  - b. Pembuatan konten video
  - c. Konfirmasi dengan PIC masing-masing wilayah pembinaan terkait kualitas konten digital yang telah dibuat
5. Penyebarluasan konten digital pembinaan, dengan tahapan:
  - a. Kajian wilayah prioritas pembinaan
  - b. Kajian metode penyampaian konten digital
  - c. Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja

#### D. RANCANGAN KEGIATAN AKTUALISASI

- Unit Kerja : Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV)
- Identifikasi Isu : 1. Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha  
 2. Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua  
 3. Belum adanya standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN  
 4. Belum optimalnya pelayanan penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua
- Isu yang diangkat : Belum optimalnya pelayanan penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua
- Gagasan Pemecahan Isu : Pemanfaatan Konten Digital dalam Pembinaan Pelayanan Penerbitan KKPR bagi Pemerintah di Daerah

**Tabel 2.10 Matriks Rancangan Kegiatan Aktualisasi**

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
1	Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah	1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR	Konten pembinaan validasi KKPR di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan</li> <li>• <b>Akuntabel</b></li> </ul>	Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompeten</b> Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik</li> <li>• <b>Kompeten</b> Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis</li> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</li> <li>• <b>Loyal</b> Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi</li> </ul>	Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten Pembinaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adaptif</b> Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Mengumpulkan informasi dengan jujur dan actual. Tidak ada informasi yang fiktif</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survey primer</li> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan</li> </ul>		ATR/BPN di daerah

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Loyal</b> Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber</li> <li>• <b>Adaptif</b> Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan</li> </ul>		
		3. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target</li> <li>• <b>Akuntabel</b></li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Konten disusun dengan mengolah informasi secara jujur dan faktual</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam mengolah data dan melakukan analisis</li> <li>• <b>Kompeten</b> Menyusun konten dengan kualitas terbaik</li> <li>• <b>Harmonis</b> Membuat lingkungan kerja yang kondusif agar dapat dengan lancar melakukan</li> <li>• <b>Loyal</b> Konten disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Konten disusun dengan memperhatikan kemampuan kelompok sasaran dalam menerima informasi</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Konten disusun dengan memperhatikan masukan rekan-rekan di unit kerja</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		4. Konfirmasi dengan mentor/ koordinator terkait konten Pembinaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntabel</b> Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan</li> <li>• <b>Kompeten</b> Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi</li> <li>• <b>Harmonis</b> Menjaga hubungan baik dengan mentor</li> <li>• <b>Loyal</b> Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan mentor</li> <li>• <b>Adaptif</b> Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan mentor</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator</li> </ul>		
2	Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah	1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam	Konten pembinaan penilaian KKPR di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa</li> </ul>	Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		penilaian KKPR		<p>diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntabel</b> Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab</li> <li>• <b>Kompeten</b> Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik</li> <li>• <b>Kompeten</b> Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis</li> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan</li> </ul>	<p>dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>	<p>peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten Pembinaan		<p>dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Loyal</b> Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Mengumpulkan informasi dengan jujur dan actual. Tidak ada informasi yang fiktif</li> <li>• <b>Kompeten</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survey primer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</li> <li>• <b>Loyal</b> Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber</li> <li>• <b>Adaptif</b> Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data</li> <li>• <b>Kolaboratif</b></li> <li>• Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		3. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Konten disusun dengan mengolah informasi secara jujur dan faktual</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam mengolah data dan melakukan analisis</li> <li>• <b>Kompeten</b> Menyusun konten dengan kualitas terbaik</li> <li>• <b>Harmonis</b> Membuat lingkungan kerja yang kondusif agar dapat dengan lancar melakukan</li> <li>• <b>Loyal</b> Konten disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Konten disusun dengan memperhatikan kemampuan</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		4. Konfirmasi dengan mentor/ koordinator terkait konten Pembinaan		<p>kelompok sasaran dalam menerima informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaboratif</b> Konten disusun dengan memperhatikan masukan rekan-rekan di unit kerja</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan</li> <li>• <b>Kompeten</b> Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi</li> <li>• <b>Harmonis</b> Menjaga hubungan baik dengan mentor</li> <li>• <b>Loyal</b> Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan mentor/koordinator</li> <li>• <b>Adaptif</b> Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan mentor</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				pemikiran penulis dan mentor/koordinator		
3	Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah	1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR	Konten pembinaan penerbitan KKPR di daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab</li> <li>• <b>Kompeten</b> Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik</li> <li>• <b>Kompeten</b></li> </ul>	Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</li> <li>• <b>Loyal</b> Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja</li> </ul>		<p>masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> <li>• Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten Pembinaan		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntabel</b> Mengumpulkan informasi dengan jujur dan actual. Tidak ada informasi yang fiktif</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survey primer</li> <li>• <b>Harmonis</b> Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun</li> <li>• <b>Loyal</b> Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber</li> <li>• <b>Adaptif</b> Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		3. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaboratif</b> Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan</li> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Konten disusun dengan mengolah informasi secara jujur dan faktual</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam mengolah data dan melakukan analisis</li> <li>• <b>Kompeten</b> Menyusun konten dengan kualitas terbaik</li> <li>• <b>Harmonis</b> Membuat lingkungan kerja yang kondusif agar dapat dengan lancar melakukan</li> <li>• <b>Loyal</b></li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		4. Konfirmasi dengan mentor/ koordinator terkait konten Pembinaan		<p>Konten disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adaptif</b> Konten disusun dengan memperhatikan kemampuan kelompok sasaran dalam menerima informasi</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Konten disusun dengan memperhatikan masukan rekan-rekan di unit kerja</li> </ul>		
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntabel</b> Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan</li> <li>• <b>Kompeten</b> Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi</li> <li>• <b>Harmonis</b> Menjaga hubungan baik dengan mentor</li> <li>• <b>Loyal</b> Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan mentor</li> <li>• <b>Adaptif</b></li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan mentor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator</li> </ul>		
4	Pembuatan konten digital untuk pembinaan	1. Reduksi informasi untuk dimasukan ke konten digital	Video	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akuntabel</b> Jujur dan cermat dalam mengolah informasi menjadi konten yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam memilih informasi penting apa saja yang paling cocok untuk disampaikan</li> <li>• <b>Loyal</b> Informasi yang direduksi disesuaikan dengan upaya pencapaian visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Konten sosialisasi direduksi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran</li> </ul>	Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Pembuatan konten digital		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaboratif</b> Melakukan diskusi dengan rekan kerja untuk mengumpulkan masukan</li> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Konten dibuat untuk semudah mungkin dimengerti oleh kelompok sasaran. Harapannya kelompok sasaran akan mendapat pemahaman yang baik tentang KKPR dan menerapkan pelayanan KKPR yang prima di daerah</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Konten yang telah disusun memiliki basis informasi yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi digital</li> <li>• <b>Loyal</b></li> </ul>		<p>Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		3. Konfirmasi dengan mentor/ koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat		<p>Konten dibuat dengan memperhatikan kualitas agar menjaga nama baik institusi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Adaptif</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis untuk menggunakan teknologi terbaru dan terpercaya dalam proses pembuatan konten</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Menarik saran dan masukan dari rekan-rekan di unit kerja</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan</li> <li>• <b>Kompeten</b> Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi</li> <li>• <b>Harmonis</b> Menjaga hubungan baik dengan mentor</li> <li>• <b>Loyal</b> Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan mentor</li> <li>• <b>Adaptif</b></li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<p>Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan mentor</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaboratif</b> Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator</li> </ul>		
5	Penyebarluasan konten digital pembinaan	1. Kajian wilayah prioritas pembinaan	Penyampaian konten digital ke kelompok target	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Memilih daerah dengan kondisi akses dan pemahaman terhadap KKPR yang paling buruk</li> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam melakukan analisis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Kajian dilakukan secara jujur berdasarkan data yang faktual</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Menarik saran dan masukan dari rekan-rekan kerja di unit kerja</li> </ul>	Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan</li> </ul>

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
		2. Kajian metode penyampaian konten digital		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji kemampuan menulis dalam melihat opsi-opsi metode penyampaian yang tersedia dan menghubungkannya dengan tujuan aktualisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Menggunakan metode dan teknologi terkini yang sekiranya bisa diakses oleh kelompok sasaran</li> <li>• <b>Kolaboratif</b> Berdiskusi dengan rekan-rekan di unit kerja untuk mendapatkan hasil pemikiran yang terbaik</li> </ul>		tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>
		3. Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Berorientasi Pelayanan</b> Bersama dengan pemerintah di daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan KKPR</li> <li>• <b>Akuntabel</b> Menyisipkan konten sosialisasi berbasis digital ini sebagai bagian dari upaya penyuksesan kegiatan pembinaan di unit kerja</li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kompeten</b> Melatih dan menguji penulis untuk dapat bekerjasama dan berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembinaan KKPR ke daerah</li> <li>• <b>Harmonis</b> Memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun di unit kerja untuk melakukan diskusi dan pengambilan keputusan</li> <li>• <b>Loyal</b> Penyampaian pembinaan menggunakan metode konten digital merupakan bentuk pengabdian penulis dan rekan-rekan di unit kerja dalam mencapai visi organisasi</li> <li>• <b>Adaptif</b> Konten sosialisasi digital merupakan bentuk adaptasi penulis dan unit kerja dalam menjalankan tugas yang dibatasi oleh factor sumber daya</li> <li>• <b>Kolaboratif</b></li> </ul>		

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1	2	3	4	5	6	7
				Proses sinkronisasi ini merupakan bentuk kolaborasi penulis dan unit kerja dalam menjawab tantangan tugas pembinaan ke daerah		

**Tabel 2.11 Rekapitulasi Rencana Habitiasi Nilai BerAKHLAK.**

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai Dasar PNS						Total	
		Ber	A	K	H	L	A		K
1	Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah								
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	6
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan	-	1	1	1	1	1	2	7
2	Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah								
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	6

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai Dasar PNS							Total
		Ber	A	K	H	L	A	K	
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan	-	1	1	1	1	1	2	7
3	Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah								
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	6
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan	-	1	1	1	1	1	2	7
4	Pembuatan konten digital berupa video untuk pembinaan								
	Reduksi informasi untuk dimasukan ke konten digital	-	1	1	-	1	1	1	5
	Pembuatan konten video	1	1	1	-	1	1	1	6
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat	-	1	1	1	1	1	2	7
5	Penyebarluasan konten digital pembinaan								
	Kajian wilayah prioritas pembinaan	1	1	1	-	-	-	1	4
	Kajian metode penyampaian konten digital	-	1	1	-	-	-	1	3
	Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja	1	-	1	1	1	1	1	6
<b>Jumlah</b>		9	20	24	14	16	16	22	121

**E. JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI**

**Tabel 2.12 Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi.**

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Jadwal (Minggu)			
		Agustus	September		
		4	1	2	3
1	Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah				
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR				
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan				
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah				
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan				
2	Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah				
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR				
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan				
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah				
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan				
3	Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah				
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR				
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan				
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah				
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan				
4	Pembuatan konten digital untuk sosialisasi pembinaan				
	Reduksi informasi untuk dimasukan ke konten digital				
	Pembuatan konten video				

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Jadwal (Minggu)			
		Agustus	September		
		4	1	2	3
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat				
5	Penyebarluasan konten sosialisasi				
	Kajian wilayah prioritas pembinaan				
	Kajian metode penyampaian konten digital				
	Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja				

## BAB III

### PELAKSANAAN AKTUALISASI

#### A. ROLE MODEL

Berdasarkan pengalaman penulis selama menjalankan tugas di Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang, penulis banyak mengamati serta mempelajari tentang sistem dan cara kerja yang dilakukan oleh para pegawai baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun pegawai non-PNS dalam memenuhi tanggung jawab pekerjaan. Penulis melihat sosok yang paling patut dijadikan contoh teladan dan *role model* adalah Ibu Corry Agustina yang merupakan Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR) Wilayah IV, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang.

Ibu Corry merupakan *role model* bagi penulis terutama dari aspek kompetensi. Dengan keahlian beliau di bidang tata ruang, walaupun Ibu Corry baru diangkat menjadi Kepala Subdirektorat SPR Wilayah IV, beliau dapat memberikan dan membenarkan pemahaman anggota Subdirektorat mengenai konsep penataan ruang yang kemudian dikaitkan dengan proses penerbitan KKPR. Selama proses habituasi beliau memberikan dukungan sehingga memudahkan pengerjaan aktualisasi penulis. Beliau memberikan arahan dan bimbingan bagi penulis dalam melaksanakan aktualisasi. Konten video yang penulis buat diarahkan agar dapat dimanfaatkan bagi unit kerja dalam melakukan pembinaan KKPR di daerah.

Ibu Corry Agustina memiliki sifat yang merefleksikan nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN yang dapat diteladani dari keseharian beliau antara lain:

1. **Nilai Berorientasi pelayanan**, beliau tunjukkan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dalam konteks permohonan KKPR, serta bersifat solutif apabila terdapat permasalahan;
2. **Nilai Akuntabel**, beliau tunjukkan dengan menjadi seorang pemimpin yang dapat membangun lingkungan kerja yang akuntabel, berkomitmen dalam menjalankan tugas, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai integritas;
3. **Nilai Kompeten**, beliau tunjukkan dengan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik dan membantu orang lain untuk belajar. Dalam melaksanakan pekerjaan, beliau dapat dengan detail mengkritisi hasil pekerjaan dan memberikan arahan lanjutan;

4. **Nilai Harmonis**, beliau tunjukkan dengan menghargai setiap orang, tanpa membedakan pangkat maupun golongan. Beliau juga membangun lingkungan kerja yang kondusif, memiliki komunikasi yang baik, sehingga penulis dan rekan-rekan kerja di subdirektorat nyaman untuk berdiskusi dengan beliau;
5. **Nilai Loyal**, beliau tunjukkan dengan melaksanakan pekerjaan sebagai Kepala Subdirektorat dengan detail, serius dan sungguh-sungguh;
6. **Nilai Adaptif**, beliau tunjukkan dengan terus berinovasi dan memberikan usulan-usulan baru dalam menyelesaikan persoalan yang tengah dihadapi;
7. **Nilai Kolaboratif**, beliau tunjukkan dengan memberi kesempatan kepada para pegawai untuk berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama, mampu berkoordinasi dengan baik dengan berbagai instansi maupun pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas.

Selain nilai-nilai dasar/*core values* ASN, beliau juga mengimplementasikan nilai manajemen ASN dan *smart* ASN dengan baik. Ibu Corry menurut penulis terutama mengimplementasikan fungsi ASN sebagai pelayan publik. Dalam kegiatan penerbitan KKPR di Subdit, beliau dengan teliti mengecek substansi KKPR yang akan diberikan ke pemohon, sehingga ada standarisasi kualitas dokumen yang di keluarkan Subdit. Selain itu, dalam surat menyurat dan penandatanganan nota dinas, beliau sudah memanfaatkan e-office, dimana ini merupakan salah satu contoh penerapan *smart* ASN yang beliau terapkan. Beliau bekerja secara profesional, memiliki etos kerja yang tinggi dan etika yang baik sehingga patut untuk dijadikan sebagai *role model*.

## **B. REALISASI KEGIATAN**

### **1. Realisasi Kegiatan dan Aktualisasi Nilai-Nilai Agenda**

Realisasi kegiatan aktualisasi merupakan tahapan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dalam rancangan aktualisasi sebelumnya. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai *output* yang diharapkan. Dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, penulis diharapkan mampu menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, penulis melakukan 5 (lima) kegiatan. Adapun realisasi kegiatan beserta *output* yang telah dicapai selama pelaksanaan aktualisasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Kegiatan yang pertama dalam aktualisasi ini adalah kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah. *Output* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah konten pembinaan validasi KKPR di daerah. *Output* tersebut berkontribusi pada pencapaian Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. *Output* pada kegiatan pertama ini juga diharapkan mampu berkontribusi pada penguatan nilai organisasi, yakni: melayani, kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat. Profesional, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah. Terpercaya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR

Tahapan pertama pada kegiatan kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah adalah kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu: wawancara atau diskusi dengan koordinator subdirektorat (secara informal sudah dilakukan sejak penyusunan rancangan aktualisasi dengan mentor dan rekan-rekan kerja subdirektorat), dan melihat keluhan pemerintah pada grup *Whatsapp* pembinaan daerah di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

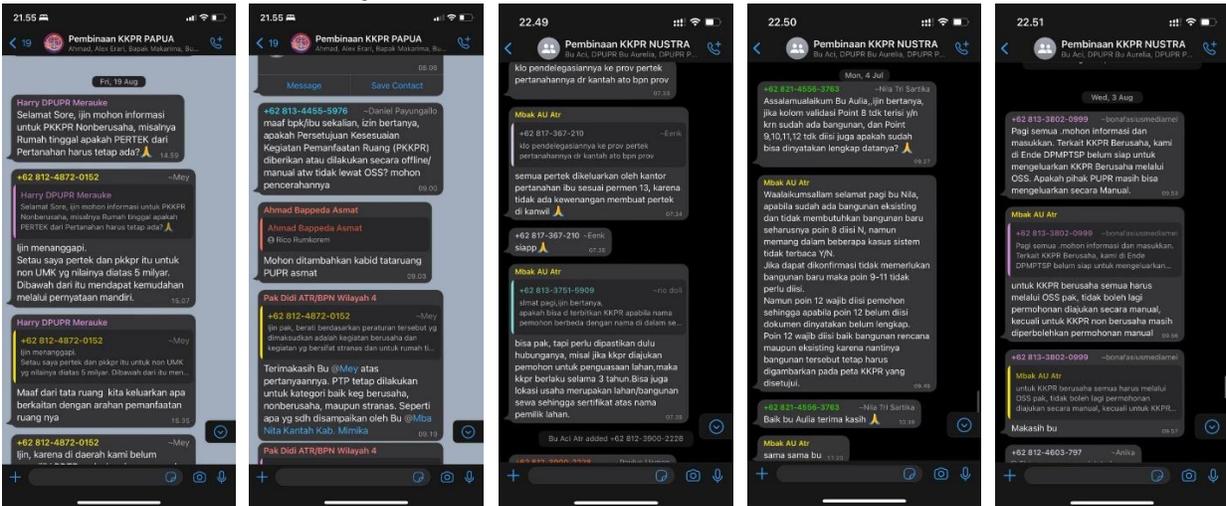
Pertanyaan wawancara mencakup ketiga proses penerbitan KKPR, antara lain validasi, penilaian dan penerbitan. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan KKPR hampir nol. Diketahui bahwa setelah pemerintah daerah menerima hak akses, berdasarkan keterangan narasumber, pemerintah daerah belum mengetahui langkah-langkah pelayanan perizinan secara daring melalui mekanisme KKPR. Dari data pada rancangan aktualisasi juga mendukung informasi ini, bahwa dari sekitar 5.000 (lima ribu) permohonan KKPR baru satu permohonan yang berhasil di proses hingga akhir.

Informasi ini kemudian penulis interpretasikan bahwa konten pembinaan yang perlu disusun perlu secara komprehensif mencakup seluruh proses penerbitan KKPR. Dari hasil observasi pada grup pembinaan daerah dan diskusi dengan kordinator dan rekan-rekan subdirektorat, penulis juga mendapati bahwa cukup banyak pertanyaan teknis mengenai pelayanan KKPR. Jadi, video yang kemudian akan penulis buat perlu menampilkan cara validasi, penilaian dan penerbitan secara *step by step*. Akan tetapi, pada diskusi penulis sebelumnya dengan mentor, mentor menekankan pentingnya memahami konteks pekerjaan yang kita lakukan terhadap gagasan besar yang melatarbelakangi pekerjaan tersebut. Dalam konteks pelayanan KKPR, pemerintah perlu memahami semangat UU Cipta Kerja dalam meningkatkan investasi di Indonesia lewat kemudahan perizinan. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan konten yang akan penulis sajikan dalam video akan diawali dengan pembahasan esensi KKPR secara singkat kemudian dilanjutkan dengan panduan proses validasi, penilaian dan penerbitan KKPR secara teknis. Untuk konten validasi, sementara penulis menyusun materi terkait tahapan proses pada laman OSS, *file* yang perlu dikumpulkan pemohon dan standar kualitas *file* yang dikumpulkan pemohon.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan
  - Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima
- Akuntabel
  - Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan
  - Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab
- Kompeten
  - Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik
  - Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis
- Harmonis

- Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini
- Kolaboratif
  - Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja



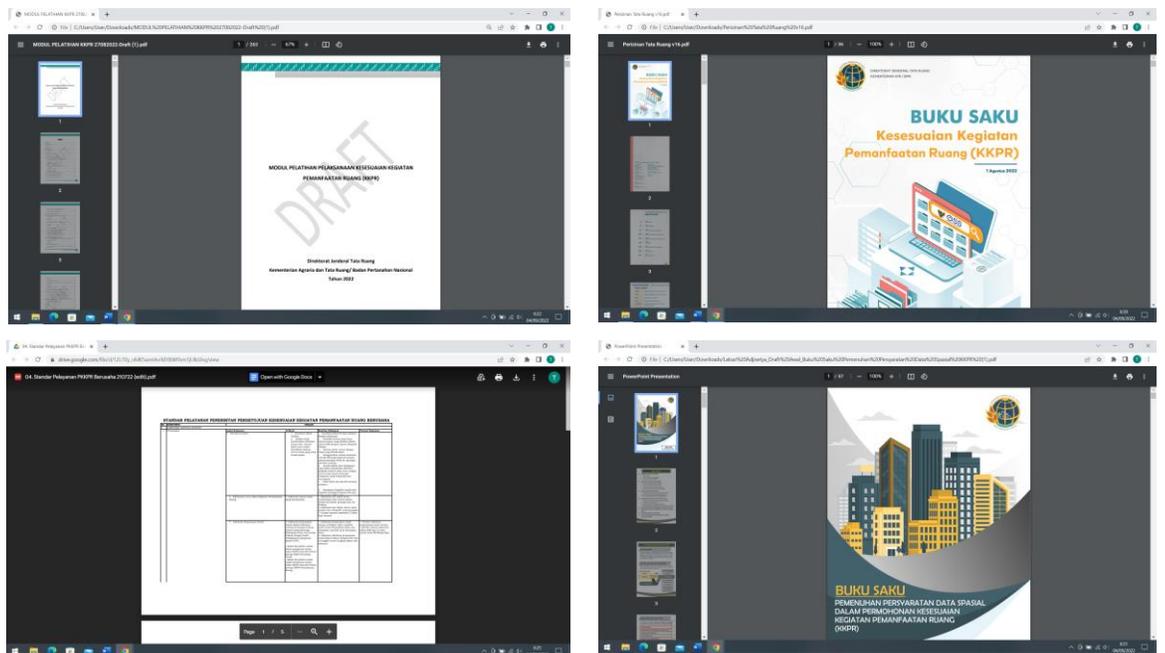
**Gambar 3.1 Keluhan pemerintah pada grup *Whatsapp* pembinaan daerah**

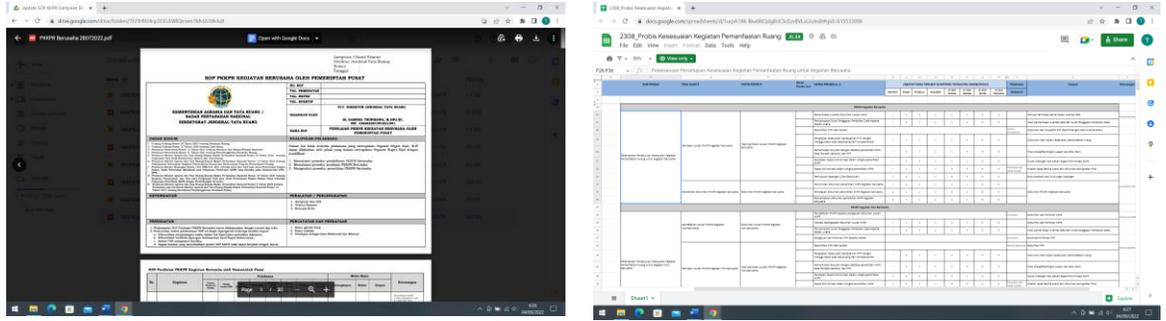
**b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan**

Tahapan kedua pada kegiatan kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah adalah mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan. Materi yang dikumpulkan penulis diambil dari modul, buku saku dan SOP penyusunan KKPR yang disusun Kementerian ATR/BPN, pengalaman penulis dalam melakukan penerbitan KKPR, dan aturan perundang-undangan terkait yang kemudian akan dijadikan sebagai bahan dalam rangka menyusun konten pembinaan.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntabel
  - Mengumpulkan informasi dengan jujur dan aktual. Tidak ada informasi yang fiktif
- Kompeten
  - Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survei primer
- Harmonis
  - Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber
  - Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data
- Kolaboratif
  - Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan





**Gambar 3.2 Informasi yang dikumpulkan untuk menyusun konten pembinaan**

c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah

Tahapan ketiga pada kegiatan kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah adalah menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah. Pada tahapan kegiatan kali ini, penulis menyusun draft konten pembinaan berdasarkan kajian kebutuhan dan berbagai macam informasi pendukung yang penulis dapatkan sesuai dengan laporan mingguan pertama. Draft ditulis di Microsoft Word dan akan terus direvisi sampai konten video selesai. Sebelum masuk ke konten validasi, penulis menjelaskan dengan singkat peran dan posisi KKPR terhadap pencapaian cita-cita UUCK untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Pada konten pembinaan validasi, penulis memastikan konten tersebut tidak lepas dari SOP yang sudah disusun Kementerian ATR/BPN mengenai pendaftaran/validasi PKKPR untuk kegiatan berusaha dan non berusaha. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam melakukan validasi KKPR, antara lain kualitas data yang diharapkan dari pelaku usaha, format data yang diberikan/diupload pelaku usaha dan kelengkapan data yang perlu diperiksa pemerintah daerah sebagai validator. Penjelasan lebih lengkap dapat kemudian dilihat pada draft konten pembinaan lewat *link* diakhir bagian. Berikut merupakan narasi yang penulis susun untuk video:

- Pada dasarnya, di laman OSS sudah tersedia berbagai panduan bagi pemerintah daerah dalam memproses permohonan KKPR. Pada bagian atas halaman, klik panduan, kemudian lihat bagian C pemerintah daerah, pilih pemrosesan PKKPR Darat oleh OPD Tata Ruang dan DPMPTSP
- Bisa dilihat dalam panduan, bahwa untuk melakukan validasi, OPD Tata Ruang perlu login pada laman OSS, kemudian masuk sebagai DPMPTSP

- Langkah selanjutnya, silakan ikuti step by step seperti pada panduan
- sekarang mari kita lihat contoh tampilan laman validasi
- Terdapat 13 poin kelengkapan data pemohon yang perlu dicek. Pada kolom status lengkap, isi dengan “ya” apabila memenuhi ketentuan persyaratan, dan “tidak” apabila tidak memenuhi atau pemohon tidak meng upload. Pada kolom keterangan, apabila data pemohon statusnya tidak lengkap, maka silakan isi alasan mengapa data tersebut dinilai tidak lengkap, salah atau tulis data tidak ditemukan agar pemohon dapat memperbaiki kesalahan mereka
- Sekarang, kita coba untuk perhatikan ketentuan setiap poin persyaratan
  - pada poin 1, apabila data sudah bisa di download maka data dinyatakan lengkap
  - pada poin 2, pemohon perlu meng upload data shp dengan ekstensi lengkap, antara lain .shp, .dbf, .shx, .prj dan luasannya sama dengan luasan isian. Untuk mengecek luasan, silakan download data dan kemudian buka <https://gistaru.atrbpn.go.id/> , pilih RDTR interaktif, pilih “alat” pada layar sebelah kiri, klik check shape file, kemudian pilih file shp pemohon yang sebelumnya telah di download. Cek kesesuaian luasannya
  - poin 3 perlu disesuaikan dengan poin 2. Apabila tidak sesuai, maka pada poin no 2, pada status lengkap diisi tidak, kemudian tulis keterangan bahwa terdapat perbedaan luasan. Terkait perbedaan luasan ini perlu diperhatikan karena angka luasan yang dipakai pada poin no 3 akan dijadikan dasar bagi pemohon untuk membayar PNPB, sedangkan file shp pada poin 2 akan dijadikan dasar pembuatan peta persetujuan. Apabila file shp nya lebih luas dan permohonannya kita setujui, maka permohonan tersebut dinilai akan menimbulkan kerugian negara
  - pada poin no 4, apabila pemohon mengisi “Y”, maka wajib mengupload surat bukti penguasaan tanah yang bisa dicek pada poin no 5. Surat bukti penguasaan tanah yang diizinkan antara lain SHM, HGB, AJB atau bukti lain yang menunjukkan penguasaan tanah lokasi yang dimohonkan. Apabila pemohon berupa PT dan bukti penguasaan yang diupload adalah SHM, maka pemohon perlu melampirkan juga surat pernyataan bahwa nama

pemilik tanah ada kaitannya dengan PT yang memohonkan KKPR. Jika pemohon belum menguasai tanah, maka KKPR nantinya berlaku 3 tahun. Dalam waktu 3 tahun diharapkan pemohon sudah dapat menguasai tanah. KKPR dapat diperpanjang untuk 2 tahun berikutnya apabila pemohon sudah menguasai lebih dari 30% lahan.

- poin no 6 menunjukkan KBLI pemohon. Cek kesesuaiannya dengan RTB atau RIK pada poin no. 12. Apabila tidak sesuai, kolom status lengkap pada poin 12 dipilih tidak
- Yang perlu diperhatikan dari isian poin no 7 sampai no 11 ialah, apabila poin no 8 diisi ya, maka poin no. 9 sampai 11 wajib diisi. Apabila tidak maka kolom status lengkap pada no. 9 sampai 11 diisi menjadi tidak
- Pada poin no 12, pemohon wajib mengupload Rencana teknis bangunan atau Rencana Induk Kawasan pada sistem berupa PDF.
  - RTB atau RIK harus diupload untuk menunjukkan lokasi bangunan eksisting/rencana terhadap bidang SHP yang dimohonkan, jalan, utilitas, serta lokasi kegiatan atau bangunan yang dimohonkan
  - File yang diupload perlu memuat dimensi luasan bangunan yang jelas, arah mata angin, legenda dan skala
  - Nantinya, RTB atau RIK ini kemudian perlu pemohon sampaikan kembali dalam bentuk SHP agar kemudian bisa di overlay dengan lokasi SHP pada poin no 2
- Pada no 13, validator hanya tinggal meng klik calculate, dan kemudian akan muncul halaman sebagai berikut. Klik close, dan jumlah PNBP yang perlu dibayarkan pemohon akan tampil pada halaman sebelumnya
- Pada aturan juga disebutkan pemohon perlu memberikan Rencana Penggunaan Air Baku/Bersih apabila dampak kegiatan pemohon signifikan terhadap ketersediaan air baku/bersih. Pemohon dapat mengupload menggunakan slot RTB/RIK pada poin 12, atau nanti bisa dimintakan oleh tim penilai kepada pemohon setelah permohonan telah selesai divalidasi
- Apabila data yang diajukan pemohon lengkap, maka permohonan dapat di validasi untuk dilanjutkan pada tahap penilaian

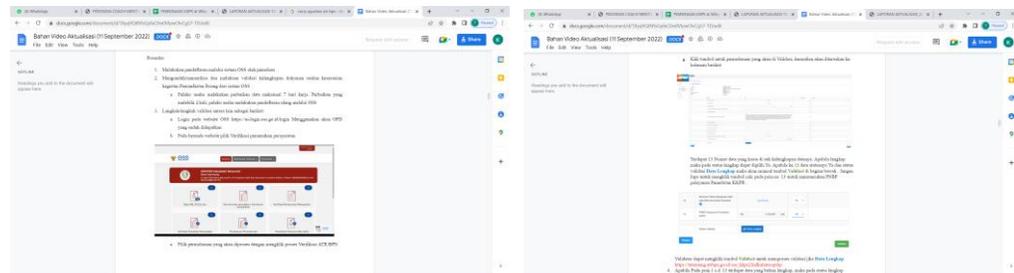
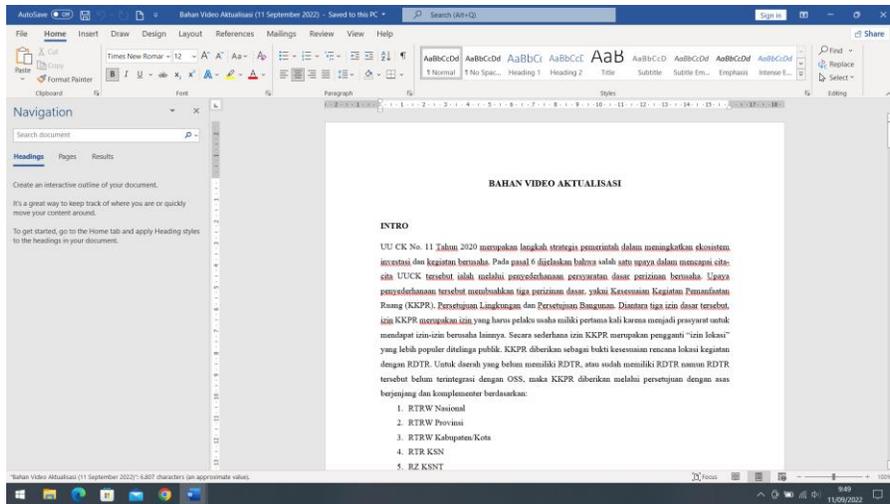
- klik tombol simpan, kemudian tombol validasi yang berwarna hijau pada pojok kanan bawah.
- Apabila ada satu saja data pemohon yang salah atau tidak lengkap, maka permohonan akan dikembalikan setelah di klik tombol ditolak
- Proses penolakan dan revisi data ini hanya dapat dilakukan 1x perbaikan data oleh pemohon, apabila setelah dilakukan revisi data oleh pemohon ternyata masih terdapat status kelengkapan data yang belum lengkap, Validator dapat menolak kembali permohonan, namun Pemohon tidak dapat merevisi data dari permohonan tersebut. Saat status permohonan ditolak 2x, Pemohon harus menginput ulang permohonan
- Apabila validasi lengkap, validator dapat Kembali ke laman sebelumnya, kemudian pada kolom aksi pilih tombol berikut untuk ke halaman detail permohonan
- Pada laman rekapitulasi persetujuan, pilih “Hasil Validasi”
- Scroll ke bawah, kemudian klik kirim notifikasi
- Apabila notifikasi sudah terkirim, maka akan muncul tulisan sebagai berikut. Pelaku usaha akan mendapat notifikasi tagihan PNBP melalui sistem OSS. Batas waktu pembayaran adalah 3 hari. Setelah 3 hari, apabila pemohon belum melakukan pembayaran, maka pemohon dapat recreate billing pembayaran maksimal 1 kali
- Jika pemohon sudah bayar, maka status permohonan akan berubah menjadi “bayar”
- Pada kolom aksi, pilih icon ini untuk Kembali ke halaman validasi.
- Pada pojok kanan bawah, klik proses persetujuan KKPR untuk mengaktifkan SLA pemrosesan verifikasi PKKPR
- Langkah selanjutnya adalah menunggu hasil pertimbangan teknis pertanahan atau PTP atau pertek dari kantor pertanahan terkait. Kantah akan mendapat notifikasi dari sistem untuk menerbitkan PTP. Secara paralel, silakan tim teknis dinas tata ruang melakukan penilaian KKPR. Hasil PTP nanti juga akan dimasukkan pada pertimbangan penilaian KKPR

- Hasil PTP nanti dapat di download dengan meng klik hasil pertek, kemudian klik download pada baris download PDF

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan
  - Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target
- Akuntabel
  - Mengumpulkan informasi dengan jujur dan actual. Tidak ada informasi yang fiktif
- Kompeten
  - Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survei primer
- Harmonis
  - Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber
  - Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data
- Kolaboratif
  - Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan

<https://docs.google.com/document/d/1XyqVQtNYsGpfaC0rx0VIpwOIvCgS7-TD/edit?usp=sharing&oid=112490286742997633604&rtpof=true&sd=true>



**Gambar 3.3 Screenshot Draft Dokumen Konten Pembinaan**

d. **Konfirmasi dengan mentor/ koordinator terkait konten pembinaan**

Tahapan keempat pada kegiatan kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah adalah konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait konten pembinaan. Konten pembinaan yang pada tahapan sebelumnya sudah disusun, kemudian didiskusikan dengan koordinator subdit untuk dilihat kesesuaiannya dengan kebutuhan pemerintah daerah. Untuk konten validasi, yang perlu diperhatikan adalah kejelasan tahapan validasi yang diilustrasikan dengan persis pada konten video. Jika bisa, video menampilkan sudut pandang *validator* ketika mereka membuka laman OSS. Kualitas data yang diharapkan dari pemohon juga perlu dijelaskan, sekaligus dengan tanggapan-tanggapan yang perlu diberikan ketika data yang diisikan pemohon tidak sesuai.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntabel

- Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan
- Kompeten
  - Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi
- Harmonis
  - Menjaga hubungan baik dengan koordinator
- Loyal
  - Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan koordinator
- Adaptif
  - Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan koordinator
- Kolaboratif
  - Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator



**Gambar 3.4 Konfirmasi dengan koordinator terkait konten pembinaan**

2) Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Kegiatan kedua dalam aktualisasi ini adalah kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah. *Output* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah konten pembinaan penilaian KKPR di daerah. *Output* dari kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. *Output* pada kegiatan kedua ini diharapkan mampu berkontribusi pada penguatan nilai organisasi, yakni: melayani, kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat.

Profesional, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah. Terpercaya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR

Tahapan kegiatan pertama dalam kegiatan kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah adalah kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Wawancara atau diskusi dengan koordinator subdirektorat (secara informal sudah dilakukan sejak penyusunan rancangan aktualisasi dengan mentor dan rekan-rekan kerja subdirektorat);
- Melihat keluhan pemerintah pada grup *Whatsapp* pembinaan daerah di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua

Pemerintah daerah terindikasi belum memahami proses pelayanan KKPR. Dari data kuantitatif juga dapat dilihat berapa daerah yang sudah memiliki hak akses. Seperti yang sudah dibahas pada bab II bahwa daerah yang sudah memiliki hak akses baru 8% untuk Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Dari data ini bisa diinterpretasikan OPD Tata Ruang dan Perizinan di wilayah timur masih asing dengan KKPR. Oleh karena itu, konten pembinaan untuk penilaian KKPR akan dibuat secara komprehensif. Secara umum, keluhan dari pemerintah daerah adalah terkait validasi KKPR, sehingga belum banyak yang menanyakan terkait penilaian. Materi yang penulis siapkan terkait konten pembinaan penilaian KKPR secara umum mencakup aspek teknis pada laman OSS, tahapan kesesuaian tata ruang secara berjenjang dan komplementer, *overview* peraturan teknis pertanahan dan kebijakan sektoral yang dapat mempengaruhi penilaian KKPR.

Nilai-nilai Ber-AKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan

- Substansi kajian disusun dengan memperhatikan *outcome* pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima
- Akuntabel
  - Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan
  - Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab
- Kompeten
  - Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik
  - Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis
- Harmonis
  - Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini
- Kolaboratif
  - Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja

Untuk konsultasi konten, penulis melakukannya bersamaan dengan konsultasi validasi dan penerbitan KKPR sehingga *evidence* kegiatan sama dengan 3.1

b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan

Tahapan kegiatan kedua dalam kegiatan kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah adalah mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan. Materi yang dikumpulkan penulis diambil dari modul, buku saku dan SOP penyusunan KKPR yang disusun Kementerian ATR/BPN; pengalaman penulis dalam melakukan penerbitan KKPR; dan aturan perundang-undangan terkait.



c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah

Tahapan kegiatan ketiga dalam kegiatan kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah adalah Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah. Konten pembinaan penilaian KKPR disatukan menjadi satu dokumen dengan konten pembinaan validasi dan penerbitan. Proses penyusunannya sama dengan proses penyusunan konten validasi dengan bersumber pada berbagai macam referensi yang penulis jelaskan pada laporan mingguan pertama. Konten penilaian dibuat untuk proses PKKPR kegiatan berusaha dan non berusaha. Beberapa hal yang dijelaskan dalam konten ini antara lain prosedur penilaian, dokumen-dokumen kebijakan yang disandingkan dengan data permohonan, ketentuan-ketentuan khusus dalam penilaian, seperti misalnya indikator penentuan hirarki tingkat kepentingan dokumen rencana yang diacu, dan lain sebagainya. Konten pembinaan penilaian untuk kegiatan berusaha dan non berusaha sama. Konten pembinaan penilaian dapat dilihat pada link yang diberikan di laporan ini. Berikut narasi untuk konten video:

- Setelah data pemohon sudah divalidasi, secara paralel dengan pengerjaan PTP, tim penilai dari OPD tata ruang perlu melakukan penilaian PKKPR
- Secara umum, penilaian dilakukan dengan mengkaji kesesuaian rencana kegiatan pemohon dengan rencana tata ruang, kebijakan sektor dan PTP.
- Kajian rencana tata ruang untuk PKKPR darat, dilakukan secara berjenjang dan komplementer terhadap:
  - RTRWN
  - RTR Pulau/Kepulauan
  - RTR KSN jika tersedia
  - RTRW Provinsi, dan
  - RTRW Kabupaten atau kota
  - dan RDTR apabila RDTR yang tersedia belum terintegrasi dengan OSS
- Tim penilai perlu memperhatikan :
  - status legalisasi RTR terbaru, dan
  - memprioritaskan RTR yang lebih rinci

- Dua hal tersebut perlu diperhatikan terutama ketika muatan rencana tata ruang tidak berkesesuaian antara level perencanaan
- Pada setiap level rencana tata ruang, perlu dicek minimal muatan berikut:
  - Overlay pola ruang
  - Peraturan zonasi
  - struktur ruang, dan
  - indikasi program
- Setelah melakukan kajian tata ruang, selanjutnya tim penilai melakukan kajian kebijakan sektor. Terdapat beberapa dokumen kajian yang perlu dijadikan acuan, bisa dilihat pada layar sebelah kanan. Untuk dua kajian kebijakan sektor pertama, antara lain:
  - overlay dengan SK Menteri Kehutanan
  - overlay dengan Lahan Sawah yang Dilindungi atau LSD dan Lahan Baku Sawah
- Apabila luasan rencana kegiatan bertampalan dengan peta kehutanan, LSD atau LBS, maka luasan permohonan yang akan disetujui adalah luasan permohonan yang tidak bertampalan dengan ketiga peta tersebut
- Untuk PIPPIB, TORA dan PITTI, silakan masukan analisis overlay apabila dinilai dibutuhkan
- Untuk kajian sektor lainnya, silakan masukan kebijakan-kebijakan sektoral yang berhubungan dengan KBLI pemohon, misalnya untuk KBLI pertambangan maka masukan keputusan atau peraturan Menteri ESDM yang terkait
- Yang terakhir adalah Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk memastikan kondisi eksisting, penguasaan lahan dan konfirmasi temuan-temuan lainnya di lapangan
- Jika diperlukan, tim penilai juga bisa melakukan audiensi atau rapat sinkronisasi yang mengundang pemohon, OPD terkait dan lembaga lain yang dinilai dapat memberikan input penilaian KKPR. Rapat dilakukan untuk menggali data yang kurang, konfirmasi data atau temuan dan pembuatan kesepakatan-kesepakatan apabila dokumen acuan penilaian masih rancu
- Rapat dapat dipimpin oleh Kepala Dinas, Pejabat administrator, Penata ruang madya atau ketua forum penataan ruang

- Hasil penilaian dapat berupa rencana kegiatan pemohon:
  - disetujui seluruhnya
  - ditolak
  - atau disetujui sebagian
- Contoh alasan ditolak atau disetujui Sebagian antara lain
  - bertampalan dengan hutan
  - bertampalan dengan LSD atau LBS
- Atau bertentangan dengan peraturan zonasi di lokasi yang dimohonkan
- Dalam pengerjaan penilaian KKPR, OPD tata ruang daerah dapat melibatkan forum penataan ruang

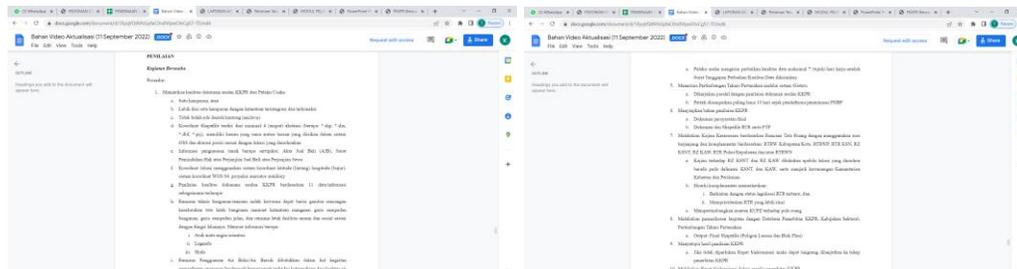
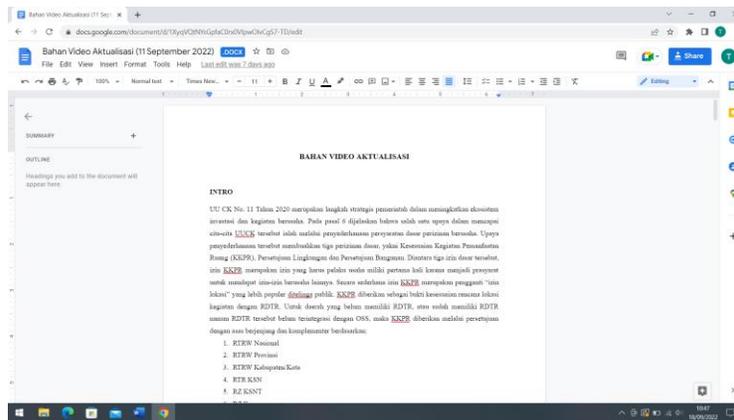
Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Berorientasi Pelayanan
  - Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target
- Akuntabel
  - Konten disusun dengan mengolah informasi secara jujur dan faktual
- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam mengolah data dan melakukan analisis
- Kompeten
  - Menyusun konten dengan kualitas terbaik
- Harmonis
  - Membuat lingkungan kerja yang kondusif agar dapat dengan lancar melakukan aktualisasi
- Loyal
  - Konten disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Konten disusun dengan memperhatikan kemampuan kelompok sasaran dalam menerima informasi

- Kolaboratif
  - Konten disusun dengan memperhatikan masukan rekan-rekan di unit kerja

Berikut merupakan *link draft konten pembinaan*:

<https://docs.google.com/document/d/1XyqVQtNYsGpfaC0rx0VIpwOivCgS7-TD/edit?usp=sharing&oid=112490286742997633604&rtpof=true&sd=true>



**Gambar 3.6 Screenshot halaman Dokumen Konten Pembinaan Penilaian**

d. Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait dengan pembinaan

Tahapan kegiatan keempat dalam kegiatan kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah adalah konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait dengan pembinaan. Dari hasil diskusi, didapatkan bahwa dalam melakukan penilaian KKPR yang paling penting adalah melihat kesesuaian permohonan dengan RTR. Pada proses penilaian, bukan hanya kesesuaian dengan RTR, namun kesesuaian dengan kebijakan sektor seperti kehutanan, pertanian atau KKOP juga penting, walaupun tidak menjadi

pertimbangan utama. Akan tetapi, prinsipnya adalah pemerintah memudahkan izin usaha masyarakat, sehingga apabila tidak disebut secara rigid bahwa suatu kegiatan dilarang (misal sudah ada RDTR, yang belum terintegrasi dengan sistem OSS, dan pada tabel ITBX kegiatan tersebut tidak diperbolehkan) maka pemerintah perlu cenderung meloloskan permohonan pelaku usaha.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Akuntabel
  - Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan
- Kompeten
  - Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi
- Harmonis
  - Menjaga hubungan baik dengan koordinator
- Loyal
  - Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan koordinator
- Adaptif
  - Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan koordinator
- Kolaboratif
  - Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator



**Gambar 3.7 Konsultasi dengan Koordinator Subdit**

3) Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah

Kegiatan ketiga dalam aktualisasi ini adalah kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah. *Output* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah konten pembinaan penerbitan KKPR di daerah. *Output* dari kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” serta tujuan organisasi yakni “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. *Output* dari kegiatan ini memberikan penguatan terhadap nilai organisasi yakni: Melayani, Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat. Profesional, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah. Terpercaya, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah.

Adapun Adapun kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) tahapan kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

a. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR

Tahapan kegiatan pertama pada kegiatan kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah adalah kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR. Kajian dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Wawancara atau diskusi dengan koordinator subdirektorat (secara informal sudah dilakukan sejak penyusunan rancangan aktualisasi dengan mentor dan rekan-rekan kerja subdirektorat);
- Melihat keluhan pemerintah pada grup *Whatsapp* pembinaan daerah di Maluku, Nusa Tenggara dan Papua.

Pada bagian penerbitan, konten yang akan dibawakan tidak akan banyak, antara lain arahan teknis penggunaan sistem OSS dan informasi apa saja yang perlu disampaikan dalam surat persetujuan atau penolakan PKKPR. Dikarenakan tahap validasi dan penilaian akan dijelaskan pada video, penulis melihat bahwa untuk menjadi satu kegiatan yang utuh, maka lebih baik juga dimasukan konten pembinaan penerbitan pada video.

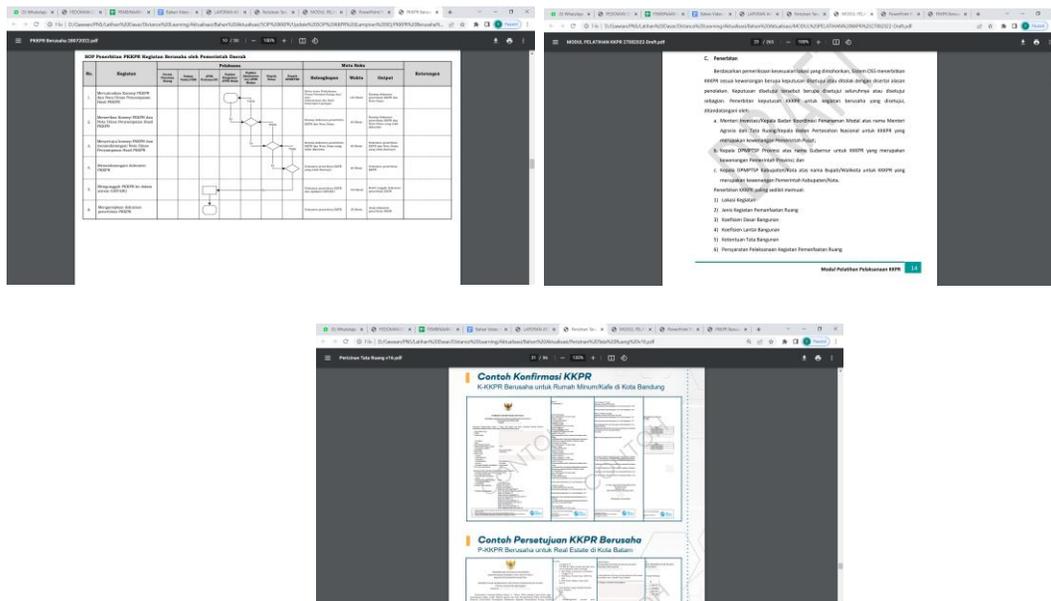
Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Berorientasi Pelayanan
  - Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima
- Akuntabel
  - Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan
  - Substansi kajian merupakan bagian dari peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab
- Kompeten
  - Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik
  - Proses kajian dapat meningkatkan kompetensi penulis
- Harmonis
  - Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini
- Kolaboratif
  - Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja

b. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan

Tahapan kegiatan kedua pada kegiatan kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah adalah mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan. Materi yang dikumpulkan penulis diambil dari modul, buku saku dan SOP penyusunan KKPR yang disusun Kementerian ATR/BPN; pengalaman penulis dalam melakukan penerbitan KKPR; dan aturan perundang-undangan terkait Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Akuntabel
  - Mengumpulkan informasi dengan jujur dan actual. Tidak ada informasi yang fiktif
- Kompeten
  - Melatih sekaligus menguji kemampuan penulis dalam berdiskusi dan survey primer
- Harmonis
  - Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
- Loyal
  - Informasi yang dikumpulkan dikaitkan dengan upaya pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Metode pencarian data disesuaikan dengan kebutuhan dan narasumber
  - Bertindak proaktif untuk melaksanakan pengumpulan data
- Kolaboratif
  - Informasi dikumpulkan dari pegawai-pegawai di kantor dengan berbagai latar belakang jabatan dan pendidikan



Gambar 3.7 Screenshoots Sumber Informasi Konten Pembinaan Penerbitan KKPR

c. Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah

Tahapan kegiatan ketiga pada kegiatan kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah adalah menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah. Konten pembinaan penerbitan tidak sebanyak dua konten lainnya karena tahapan prosedurnya yang relatif lebih sedikit. Pada konten penerbitan, output yang perlu dibuat antara lain nota dinas ke kepala dinas, surat PKKPR yang perlu ditandatangani kepala DPMPTSP dan kemudian mengupload hasil PKKPR ke sistem OSS untuk kegiatan berusaha atau dikirim secara manual untuk kegiatan non berusaha. Isi konten pembinaan dapat dilihat pada link dokumen pembinaan proses penerbitan di laporan kali ini. Berikut merupakan narasi video yang penulis susun:

- Hasil final naskah PKKPR yang telah melalui proses penilaian dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang perlu diinput pada Gistaru
- (tunjukkan contoh Naskah PKKPR)
- untuk format naskah kkpr, bisa dilihat pada lampiran permen 13 tahun 2021. Khusus untuk persetujuan KKPR berusaha oleh pemerintah daerah, bisa dilihat di halaman 70.
- isi informasi permohonan sesuai format
- beberapa poin yang bisa menjadi perhatian, misalnya pada baris KDB, KLB dan baris informasi tambahan. Keterangan ini bisa diisi bersumber pada RTRW, SNI, Perda BG, Perwal/Perbup ketentuan tata bangunan atau RTBL
- Pada isian indikasi program pemanfaatan ruang, diisi dengan indikasi program utama pada peruntukan pola ruang kawasan yang diajukan oleh pemohon
- Pada isian Persyaratan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, dapat diisi dengan peraturan zonasi pada rencana tata ruang yang bisa bersumber dari RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota ataupun hasil analisis yang bersumber dari kajian, rekomendasi forum, dan lain sebagainya
- Setelah baris informasi tambahan pada poin 10, pada bagian pertimbangan, masukan dasar rencana tata ruang yang menjadi acuan disetujui atau ditolaknya permohonan dan masukan juga PTP. Masukan secara detil pasal dan ayat yang menjadi acuan pertimbangan

- Pada bagian ketentuan lainnya, sesuaikan dengan jenis KKPR berdasarkan penguasaan tanah. Apakah KKPR yang dikeluarkan merupakan KKPR perolehan tanah atau pemanfaatan ruang
- Pada lampiran peta persetujuan, masukan peta yang merupakan pertampalan pola ruang RTRW dengan RIK atau RTB yang diupload pemohon
- Berikut contoh petanya
- Setelah naskah KKPR sudah ditandatangani pejabat yang berwenang, silakan masuk Kembali ke laman gistaru kemudian ke halaman detail permohonan KKPR yang sedang di proses
- klik Hasil KKPR, kemudian scroll kebawah
- isi informasi KKPR sesuai dengan naskah KKPR atau hasil penilaian
- pada poin no 17, upload naskah PKKPR yang sudah ditandatangani pejabat yang berwenang
- jika sudah, klik simpan data
- Notifikasi hasil verifikasi akan dikirim ke akun DPMPTSP  
DPMPTSP akan mengirim hasil persetujuan/penolakan KKPR ke sistem OSS

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Berorientasi Pelayanan
  - Konten disusun dengan memperhatikan ketersampaiannya kepada kelompok target
- Akuntabel
  - Konten disusun dengan mengolah informasi secara jujur dan faktual
- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam mengolah data dan melakukan analisis
  - Menyusun konten dengan kualitas terbaik
- Harmonis
  - Membuat lingkungan kerja yang kondusif agar dapat dengan lancar melakukan aktualisasi
- Loyal

- Konten disusun dengan memperhatikan ketercapaian visi organisasi
  - Adaptif
    - Konten disusun dengan memperhatikan kemampuan kelompok sasaran dalam menerima informasi
  - Kolaboratif
    - Konten disusun dengan memperhatikan masukan rekan-rekan di unit kerja
- d. Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait konten pembinaan

Tahapan kegiatan keempat pada kegiatan kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah adalah konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait konten pembinaan. Pada proses penerbitan, yang penting untuk diperhatikan adalah hubungan antara dinas tata ruang dan DPMPTSP daerah. Perlu dipertegas tanggung jawab dinas-dinas terkait. Jika bisa juga memberikan contoh surat KKPR yang sudah terbit. Untuk bukti tahapan, sudah digabung dengan diskusi pada dua kegiatan sebelumnya.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Akuntabel
    - Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan
  - Kompeten
    - Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi
  - Harmonis
    - Menjaga hubungan baik dengan koordinator
  - Loyal
    - Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan koordinator
  - Adaptif
    - Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan koordinator
  - Kolaboratif
    - Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator
- 4) Pembuatan konten digital untuk pembinaan

Kegiatan keempat yang dilakukan dalam aktualisasi ini adalah pembuatan konten digital untuk pembinaan. *Output* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah berupa video

untuk pembinaan. *Output* pada kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan misi Kementerian ATR/BPN yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. *Output* kegiatan ini sebagai penguat nilai organisasi, yakni: Melayani, kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat. Profesional, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah. Terpercaya, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital

Tahapan kegiatan pertama dalam kegiatan pembuatan konten digital untuk pembinaan adalah reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital. Konten hasil diskusi dengan koordinator kemudian direduksi kembali untuk dipilih mana konten yang cocok dimasukan ke dalam video. Pada konten validasi, informasi yang akhirnya tidak dimasukan berupa tahapan-tahapan pada draft SOP yang penulis nilai tidak perlu terlalu detil dijelaskan, contohnya staf dengan jabatan apa yang bertanggung jawab pada setiap tahapan validasi. Konten yang penting dimasukan pada proses penilaian antara lain diperjelas bagian mana pada RTR yang perlu diperhatikan oleh tim penilai. Secara umum, penilai langsung bisa melihat pola ruang dan KUPZ pada dokumen RTR untuk menilai kesesuaian permohonan. Sama seperti pada tahap validasi, tahapan-tahapan pada draft SOP penilaian KKPR ada beberapa yang tidak dimasukan, contohnya adalah tahap administrasi. Untuk proses penerbitan, hampir tidak ada reduksi informasi yang dilakukan karena tahapannya juga tidak banyak. Pada konten penerbitan, perlu diperhatikan pihak yang bertanggungjawab pada tahapan validasi serta ketentuan administrasi yang perlu dipenuhi.

Nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

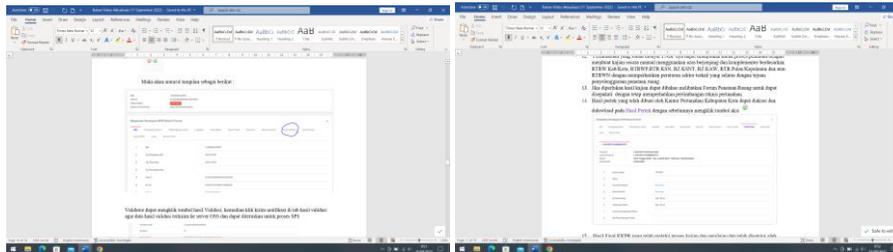
- Akuntabel
  - Jujur dan cermat dalam mengolah informasi menjadi konten yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya

- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam memilih informasi penting apa saja yang paling cocok untuk disampaikan
- Loyal
  - Informasi yang direduksi disesuaikan dengan upaya pencapaian visi organisasi
- Adaptif
  - Konten sosialisasi direduksi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok sasaran
- Kolaboratif
  - Melakukan diskusi dengan rekan kerja untuk mengumpulkan masukan

*Link File Progress Aktualisasi:*

<https://drive.google.com/drive/folders/1-01r46RXIN8LhRnH32xpdTT4Jo-TOqKA?usp=sharing>

*Screenshoot Tambahan Draft Dokumen Konten Pembinaan*



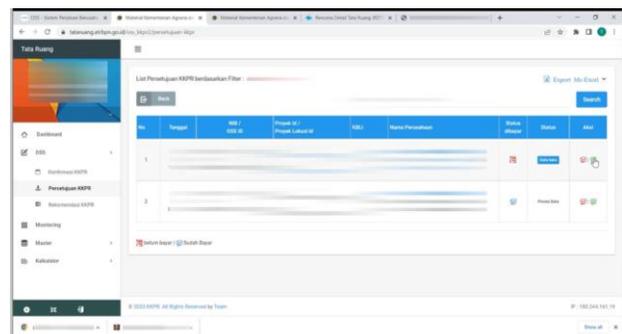
**Gambar 3.8 Screenshoot Tambahan Draft Dokumen Konten Pembinaan**

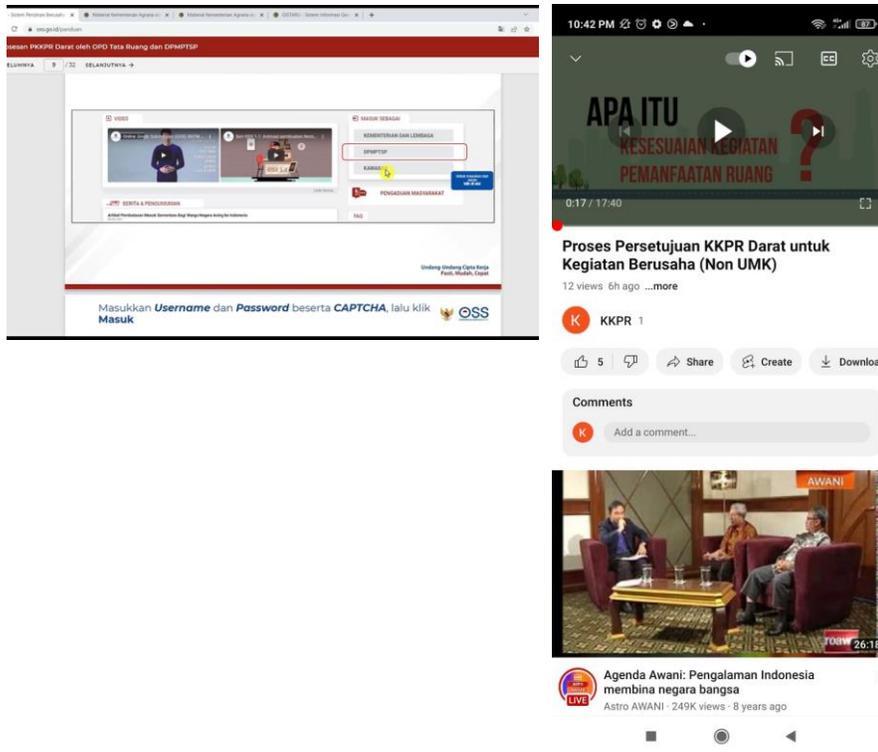
**b. Pembuatan konten video**

Tahapan kegiatan kedua dalam kegiatan pembuatan konten digital untuk pembinaan adalah pembuatan konten video. Video yang dibuat dengan judul “Proses Persetujuan KKPR Darat untuk Kegiatan Berusaha (Non UMKM)” memuat definisi dari KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), tahapan-tahapan dalam penerbitan KKPR, meliputi tahap validasi, penilaian, dan penerbitan KKPR. Dalam video ini juga ditampilkan bagaimana langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam proses pengajuan KKPR melalui laman OSS (*Online Single Submission*). Konten Video ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik dan menyeluruh tentang KKPR.

Adapun nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Berorientasi pelayanan
  - Konten dibuat untuk semudah mungkin dimengerti oleh kelompok sasaran. Harapannya kelompok sasaran akan mendapat pemahaman yang baik tentang KKPR dan menerapkan pelayanan KKPR yang prima di daerah.
- Akuntabel
  - Konten yang telah disusun memiliki basis informasi yang bisa dipertanggungjawabkan
- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis untuk menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis teknologi digital
- Loyal
  - Konten dibuat dengan memperhatikan kualitas agar menjaga nama baik institusi
- Adaptif
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis untuk menggunakan teknologi terbaru dan terpercaya dalam proses pembuatan konten
- Kolaboratif
  - Menarik saran dan masukan dari rekan-rekan di unit kerja

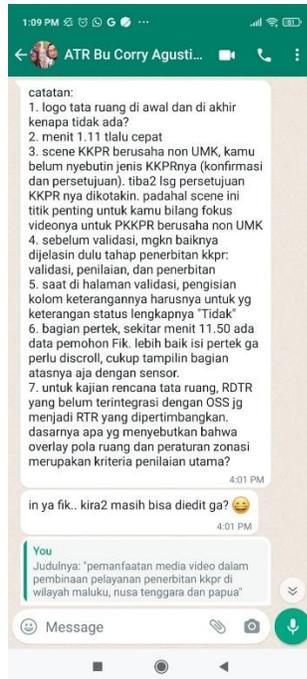




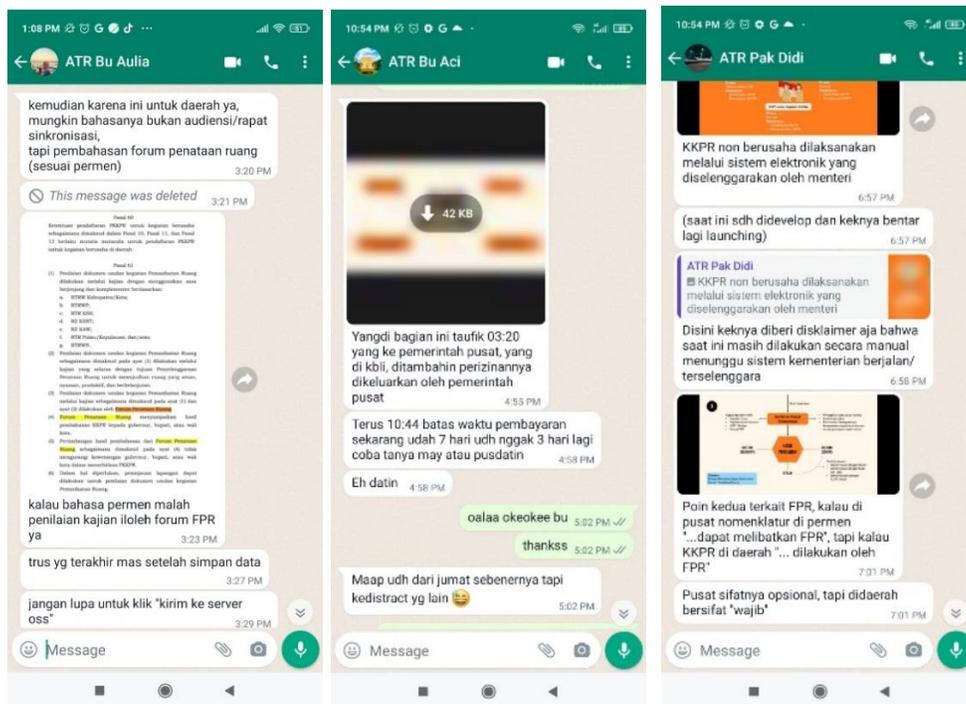
**Gambar 3.9 Pembuatan Konten Video Penerbitan KKPR**

- c. Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat

Tahapan kegiatan keempat dalam kegiatan pembuatan konten digital untuk pembinaan adalah konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat. Pada tahap kegiatan ini, penulis meminta saran dan masukan dari mentor dan koordinator terkait konten video yang telah dibuat penulis pada tahap kegiatan sebelumnya. Pada tahap kegiatan ini, mentor dan koordinator memberikan masukan terhadap muatan video yang kemudian dijadikan sebagai perbaikan oleh penulis sebelum disosialisasikan kepada pemerintah daerah. Konfirmasi dengan mentor dan koordinator dilakukan melalui *whatsapp*. Berikut merupakan hasil saran dan masukan dari mentor/koordinator.



**Gambar 3.10 Konfirmasi dengan Mentor terkait Konten Video yang telah Dibuat**



**Gambar 3.11 Konfirmasi dengan Koordinator terkait Konten Video yang telah Dibuat**

Adapun nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Akuntabel
  - Memaparkan hasil kajian berdasarkan fakta pekerjaan yang dilakukan
- Kompeten
  - Meningkatkan kompetensi dan pemahaman topik kajian lewat diskusi
- Harmonis
  - Menjaga hubungan baik dengan mentor
- Loyal
  - Diskusi dilakukan tanpa mengganggu pekerjaan mentor
- Adaptif
  - Menyesuaikan waktu dan tempat diskusi dengan mentor
- Kolaboratif
  - Hasil konten pembinaan merupakan kolaborasi pemikiran penulis dan mentor/koordinator

#### 5) Penyebarluasan konten digital pembinaan

Kegiatan kelima yang dilakukan dalam aktualisasi ini adalah penyebarluasan konten digital pembinaan. *Output* yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah penyampaian konten digital ke kelompok target. *Output* pada kegiatan ini sebagai salah satu cara untuk mewujudkan misi Kementerian ATR/BPN yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia” serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. *Output* kegiatan ini sebagai penguat nilai organisasi, yakni: Melayani, kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat. Profesional, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah. Terpercaya, Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah.

Adapun kegiatan ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan kegiatan sebagai berikut:

##### a. Kajian wilayah prioritas pembinaan

Tahap kegiatan pertama dalam kegiatan penyebarluasan konten digital pembinaan adalah kajian wilayah prioritas pembinaan. Wilayah yang menjadi target penyebaran

video ialah seluruh lingkup wilayah pembinaan Subdirektorat Sinkronisasi Wilayah IV dengan pertimbangan *cost* kegiatan yang dapat dikatakan tidak ada. Karena bentuk konten pembinaan adalah video, sehingga konten tersebut dapat disebarluaskan secara mudah dengan meng-*upload* konten di platform youtube dan kemudian tautannya bisa dibagikan salah satunya lewat aplikasi whatsapp.

Adapun nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Berorientasi pelayanan
  - Memilih daerah dengan kondisi akses dan pemahaman terhadap KKPR yang paling buruk
- Akuntabel
  - Kajian dilakukan secara jujur berdasarkan data yang faktual
- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan penulis dalam melakukan analisis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu
- Kolaboratif
  - Menarik saran dan masukan dari rekan-rekan kerja di unit kerja

<b>Provinsi</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>	<b>Sudah Selesai</b>	<b>Persentase</b>
Maluku	497	0	0%
Maluku Utara	616	0	0%
Nusa Tenggara Barat	1.037	0	0%
Nusa Tenggara Timur	1.490	0	0%
Papua	1.338	0	0%
Papua Barat	763	1	0,1%
Total	5.741	1	0%

*Sumber: Hasil Olahan Data OSS, 2022*

b. Kajian metode penyampaian konten digital

Tahap kegiatan kedua dalam kegiatan penyebarluasan konten digital pembinaan adalah kajian metode penyampaian konten digital. Untuk membatasi penyebaran

konten agar lebih terfokus pada OPD tata ruang, penulis memutuskan untuk menggunakan platform whatsapp dalam upaya penyampaian konten. Tautan video akan disebarluaskan secara satu persatu lewat narahubung instansi yang terinventarisir oleh sekretaris subdirektorat. Dengan demikian, komunikasi dan feedback dengan perwakilan instansi dapat berjalan dengan lebih baik diakibatkan pesan disampaikan secara personal

Adapun nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Kompeten
  - Melatih dan menguji kemampuan menulis dalam melihat opsi-opsi metode penyampaian yang tersedia dan menghubungkannya dengan tujuan aktualisasi
- Adaptif
  - Menggunakan metode dan teknologi terkini yang sekiranya bisa diakses oleh kelompok sasaran
- Kolaboratif
  - Berdiskusi dengan rekan-rekan di unit kerja untuk mendapatkan hasil pemikiran yang terbaik

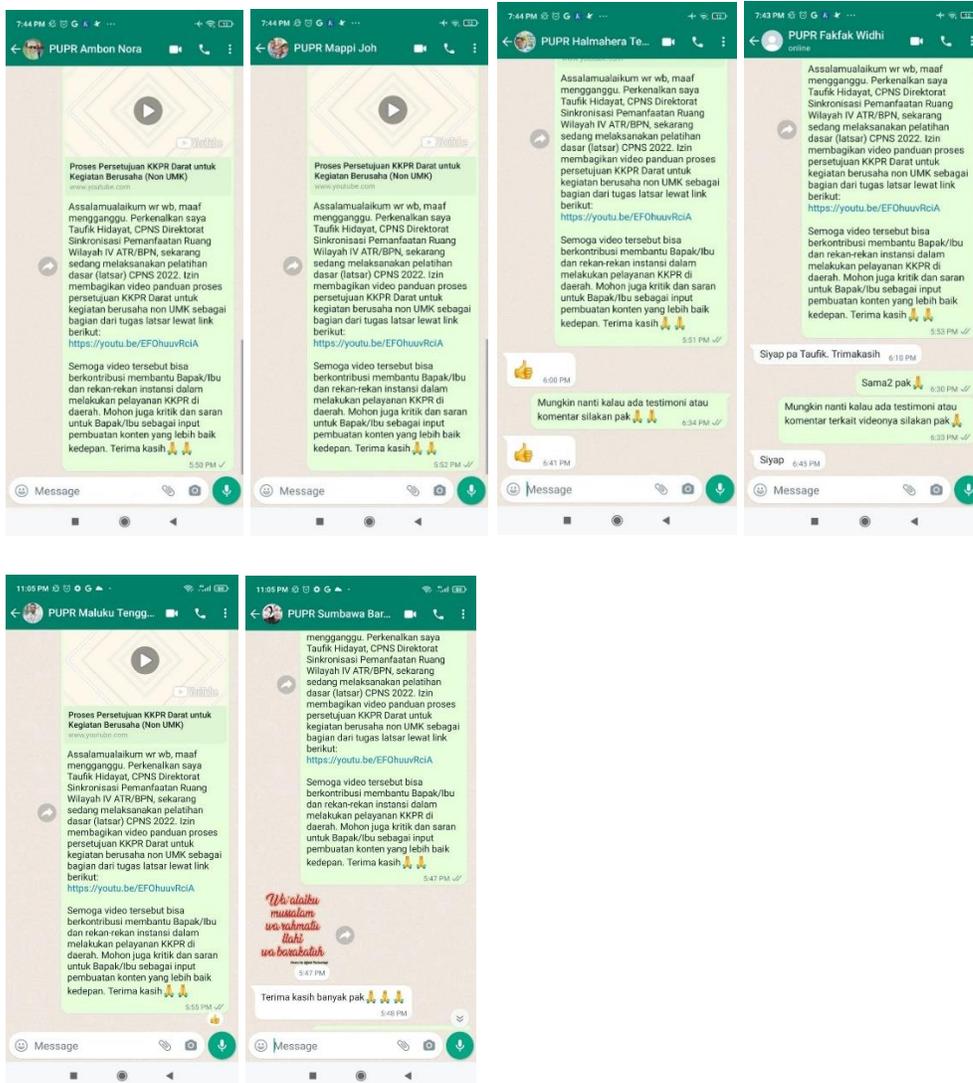
c. Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja

Tahap kegiatan ketiga dalam kegiatan penyebarluaskan konten digital pembinaan adalah sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja. Konten video yang telah dibuat nantinya akan disempurnakan untuk kemudian dapat dijadikan konten pembinaan di subdirektorat ketika melakukan pembinaan KKPR langsung ke daerah. Sementara, hasil video disebarluaskan melalui aplikasi *whatsapp* sesuai dengan keputusan pada tahapan kegiatan sebelumnya. Konten ini juga dapat menjadi bahan bagi Subdirektorat lain di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dalam membuat satu video pembinaan untuk satu Direktorat.

Adapun nilai-nilai BerAKHLAK yang diterapkan penulis pada tahap kegiatan ini adalah:

- Berorientasi pelayanan

- Bersama dengan pemerintah di daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan KKPR
- Akuntabel
  - Menyisipkan konten sosialisasi berbasis digital ini sebagai bagian dari upaya penyuksesan kegiatan pembinaan di unit kerja
- Kompeten
  - Melatih dan menguji penulis untuk dapat bekerjasama dan berpartisipasi dalam merumuskan rencana pembinaan KKPR ke daerah
- Harmonis
  - Memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun di unit kerja untuk melakukan diskusi dan pengambilan keputusan
- Loyal
  - Penyampaian pembinaan menggunakan metode konten digital merupakan bentuk pengabdian penulis dan rekan-rekan di unit kerja dalam mencapai visi organisasi
- Adaptif
  - Konten sosialisasi digital merupakan bentuk adaptasi penulis dan unit kerja dalam menjalankan tugas yang dibatasi oleh factor sumber daya
- Kolaboratif
  - Proses sinkronisasi ini merupakan bentuk kolaborasi penulis dan unit kerja dalam menjawab tantangan tugas pembinaan ke daerah



**Gambar 3.12 Beberapa Contoh Screenshoots Penyebarluasan Konten Video  
Pembinaan Lewat Aplikasi *Whatsapp***

Setelah melaksanakan aktualisasi, tidak terdapat penambahan nilai BerAKHLAK dari rancangan aktualisasi. Nilai-nilai BerAKHLAK terimplementasi dengan baik pada setiap tahapan kegiatan. Berikut merupakan perbandingan habituasi nilai BerAKHLAK pada saat rancangan dan pelaksanaan aktualisasi.

**Tabel 3.1 Perbandingan Rancangan dan Realisasi Penerapan Nilai BerAKHLAK pada Setiap Tahapan Kegiatan**

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Rancangan Penerapan Nilai Dasar ASN							Total	Realisasi Penerapan Nilai Dasar ASN							Total
		Ber	A	K	H	L	A	K		Ber	A	K	H	L	A	K	
1	Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah																
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	6	-	1	1	1	1	1	1	6
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan	-	1	1	1	1	1	2	7	-	1	1	1	1	1	2	7
2	Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah																
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam	-	1	1	1	1	1	1	6	-	1	1	1	1	1	1	6

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Rancangan Penerapan Nilai Dasar ASN						Total	Realisasi Penerapan Nilai Dasar ASN						Total		
		Ber	A	K	H	L	A		K	Ber	A	K	H	L		A	K
	rangka menyusun konten sosialisasi																
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator subdit terkait konten pembinaan	-	1	1	1	1	1	2	7	-	1	1	1	1	1	2	7
	Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah																
	Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penerbitan KKPR	1	2	2	1	1	1	1	9	1	2	2	1	1	1	1	9
	Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten sosialisasi	-	1	1	1	1	1	1	6	-	1	1	1	1	1	1	6
	Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	1	1	2	1	1	1	1	8	1	1	2	1	1	1	1	8
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator	-	1	1	1	1	1	2	7	-	1	1	1	1	1	2	7
3																	

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Rancangan Penerapan Nilai Dasar ASN							Total	Realisasi Penerapan Nilai Dasar ASN							Total
		Ber	A	K	H	L	A	K		Ber	A	K	H	L	A	K	
	subdit terkait konten pembinaan																
4	Pembuatan konten digital berupa video untuk pembinaan																
	Reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital	-	1	1	-	1	1	1	5	-	1	1	-	1	1	1	5
	Pembuatan konten video	1	1	1	-	1	1	1	6	1	1	1	-	1	1	1	6
	Konfirmasi dengan mentor/koordinator terkait kualitas konten digital yang telah dibuat	-	1	1	1	1	1	2	7	-	1	1	1	1	1	2	7
5	Penyebarluasan konten digital pembinaan																
	Kajian wilayah prioritas pembinaan	1	1	1	-	-	-	1	4	1	1	1	-	-	-	1	4
	Kajian metode penyampaian konten digital	-	1	1	-	-	-	1	3	-	1	1	-	-	-	1	3
	Sinkronisasi metode pembinaan berbasis digital dengan kegiatan di unit kerja	1	-	1	1	1	1	1	6	1	-	1	1	1	1	1	6
<b>Jumlah</b>		9	20	24	14	16	16	22	121	9	20	24	14	16	16	22	121

### C. MANFAAT AKTUALISASI

Kegiatan aktualisasi ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi berbagai pihak. Bagi penulis, kegiatan aktualisasi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kompetensi penulis mengenai KKPR yang menjadi salah satu tugas pada Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang.

Kegiatan aktualisasi ini juga memberikan manfaat terhadap satuan kerja penulis, yakni dapat dijadikan sebagai salah satu materi pembinaan teknis KKPR kepada pemerintah daerah. Selain itu, kegiatan aktualisasi memberikan manfaat terutama kepada pemerintah daerah sebagai pihak yang berperan penting dalam melaksanakan kegiatan KKPR, dengan meningkatnya pemahaman pemerintah daerah akan KKPR, tingkat pelayanan KKPR di daerah dapat meningkat, pelaku usaha semakin mudah dalam berinvestasi sehingga kedepannya investasi akan di daerah akan semakin meningkat.

Berikut penulis sertakan testimoni dari perwakilan tenaga ahli Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, Armei Rapudin selaku pihak eksternal dan atasan penulis Ibu Corry Agustina selaku Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang selaku pihak internal:



### D. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT REALISASI AKTUALISASI

Faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi adalah berupa bimbingan dan arahan dari mentor serta dukungan dan saran dari rekan kerja penulis. Selain itu, arahan dari

*coach* baik melalui *zoom meeting* atau *whatsapp* sebagai motivasi untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi.

Selain faktor pendukung, terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan aktualisasi. Adapun faktor pengambat dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi adalah perangkat laptop penulis yang tidak mendukung, Sering terjadi *lag* dan eror saat membuka banyak program atau bahkan saat hanya membuka software untuk video editing.

### E. TINDAK LANJUT

Adapun tindak lanjut dari kegiatan dalam implementasi aktualisasi yang sesuai dengan nilai BerAKHLAK adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Rencana Tindak Lanjut Aktualisasi Nilai-Nilai BerAKHLAK**

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai BerAKHLAK	Teknik Aktualisasi
1	2	3	4
1	Pembuatan konten pembinaan PKKPR kegiatan non berusaha	<b>Berorientasi pelayanan</b>	Substansi kajian disusun dengan memperhatikan outcome pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah di daerah secara prima
		<b>Akuntabel</b>	Substansi kajian merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat dalam melakukan pembinaan
		<b>Kompeten</b>	Proses kajian membutuhkan pemahaman penulis akan substansi dan kemampuan analisis yang baik
		<b>Harmonis</b>	Mengumpulkan informasi lewat diskusi dengan rekan-rekan di unit kerja. Kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun
		<b>Loyal</b>	Kajian dilakukan dengan memperhatikan kebermanfaatan kegiatan dengan pencapaian visi organisasi
		<b>Adaptif</b>	Substansi kajian disesuaikan dengan kemampuan adaptasi kelompok sasaran. Substansi yang dibuat juga disinkronkan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Nilai-Nilai BerAKHLAK	Teknik Aktualisasi
1	2	3	4
		<b>Kolaboratif</b>	Hasil kajian merupakan gabungan ide dan pemikiran penulis dan rekan-rekan di unit kerja

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kegiatan aktualisasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang merupakan bentuk Pendidikan dan Pelatihan untuk mengembangkan kompetensi yang dilakukan secara terintegrasi sehingga mampu menunjukkan sikap perilaku bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar BerAKHLAK, mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI, serta menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.

Penerapan sikap, perilaku, nilai-nilai dasar dan pengetahuan peserta pelatihan dasar dilaksanakan melalui kegiatan aktualisasi dan habituasi pada unit kerja masing-masing, dalam hal ini adalah pada Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang. Dalam kegiatan aktualisasi “Pemanfaatan Media Video dalam Pembinaan Pelayanan Penerbitan KKPR di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua” penulis telah menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK pada setiap pelaksanaan kegiatan, yakni mulai dari kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah, kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah, kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah, pembuatan konten digital untuk pembinaan, dan penyebarluasan konten digital pembinaan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, penulis juga menerapkan nilai-nilai Kementerian ATR/BPN yakni Melayani, Profesional, dan Terpercaya. Kegiatan aktualisasi sebagai bekal bagi penulis dalam melaksanakan tugas dan telah memberikan dampak yang positif. Manfaat dari konten video pembinaan ini tidak hanya terbatas pada wilayah yang termasuk pada lingkup unit kerja penulis, namun bisa menjadi bahan ataupun referensi kegiatan pembinaan untuk unit kerja dalam Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang lain dengan lingkup kegiatan yang berbeda.

Adapun tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi yang dapat direkomendasikan untuk kedepannya yaitu pembuatan konten pembinaan PKKPR kegiatan non berusaha, sehingga konten digital yang dibuat nantinya akan mencakup keseluruhan proses KKPR pada berbagai tipologi.

Penulis berkomitmen untuk terus melakukan penerapan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN sesuai kedudukan dan senantiasa berkontribusi terhadap pencapaian Visi dan Misi Kementerian ATR/BPN serta senantiasa memberikan penguatan terhadap nilai-nilai Kementerian ATR/BPN.

## **B. REKOMENDASI**

Konten video yang telah dibuat dapat menjadi bahan pembinaan utamanya bagi unit kerja penulis dan apabila dibutuhkan dapat menjadi konten pembinaan bagi seluruh subdirektorat di Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang. Oleh karena itu, dibutuhkan koordinasi pada level Kasubdit dalam menyepakati konten pembinaan Direktorat dalam bentuk video.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fattimah, Elly dan Erna Irawati. 2017. Modul Pelatihan Dasar Calon PNS Manajemen Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Handoko, Ramah. 2021. Modul Akuntabel Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Jalis, Ahmad. 2021. Modul Kompeten Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mirdin, Andi Adiyat. 2021. Modul Berorientasi Pelayanan Pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Rahmanendra, Dwi. 2021. Modul Loyal Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Sejati, Tri A. 2021. Modul Kolaboratif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Sembodo, Jarot. 2021. Modul Harmonis Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Suwarno, Yogi. 2021. Modul Adaptif Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agrari dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## LAMPIRAN

### Surat Pernyataan

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Taufik Hidayat, S.T.  
NIP : 199311022022041001  
Pangkat/Gol : Penata Muda/ IIIA  
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Ruang  
Unit Kerja : Direktorat Sinkronisasi Penataan Ruang  
Instansi : Kementerian ATR/BPN

Menyatakan bahwa :

1. Saya adalah peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan 3 Angkatan 33 Tahun 2022
2. Berkomitmen untuk melaksanakan pembiasaan diri dalam melaksanakan tugas jabatan di tempat kerja, dengan mengaktualisasikan substansi mata-mata pelatihan nilai-nilai dasar PNS yang dilandasi oleh kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya *Smart Governance*.
3. Bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Jakarta, 2 November 2022

Mengetahui

Yang Menyatakan,



Corry Agustina, S.T., M.Sc.

NIP. 198608252009122001

Taufik Hidayat, S.T.

NIP. 199311022022041001

## LEMBAR KONSULTASI RANCANGAN AKTUALISASI PESERTA TERHADAP MENTOR

Rincian Pelaksanaan Bimbingan Oleh Mentor

Pada tahap Merancang Kegiatan Aktualisasi

Nama Peserta		Taufik Hidayat, S.T.		
Instansi		Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV		
Tempat Aktualisasi		Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV		
No	Tanggal	Catatan Bimbingan	Tindak Lanjut	Paraf Mentor
1	17 Agustus 2022	Konsultasi mengenai pemilihan isu di unit kerja	Saran pengayaan analisis <i>fishbone</i> menggunakan standar pelayanan pada Permen PAN RB	
2	23 Agustus 2022	Konsultasi mengenai rancangan aktualisasi	Perbaikan judul	

MENTOR



E. A. Makarima M., S.T., M.T., M.Sc.

NIP. 197411272005021002

Tanggal 23 Agustus 2022

**LEMBAR KONSULTASI RANCANGAN AKTUALISASI PESERTA TERHADAP  
COACH**

Rincian Pelaksanaan Bimbingan Oleh Coach

Pada tahap Merancang Kegiatan Aktualisasi

Nama Peserta		Taufik Hidayat, S.T.		
Instansi		Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV		
Tempat Aktualisasi		Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV		
No	Tanggal	Catatan Bimbingan	Tindak Lanjut	Paraf Coach
1	15 Agustus 2022	Konsultasi mengenai pemilihan isu di unit kerja	Rapikan sesuai format laporan	
2	23 Agustus 2022	Konsultasi mengenai rancangan aktualisasi	Perjelas lokus pada isu, tambahkan kegiatan dan tahapan kegiatan dengan lebih rinci, perhatikan keterkaitan <i>core values</i> dengan tahapan kegiatan	

Coach



Nopy Hidayat, S.Si.

NIP. 198111052009121002

Tanggal 23 Agustus 2022

## ANGKET PEMILIHAN ISU BERDASARKAN ANALISIS USG

### Angket Pemilihan Isu Berdasarkan Analisis USG

Responden : Einstein Al Makarima Mohammad, S.T., M.T., M.Sc.

Jabatan : Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang (SPR) Wilayah IV

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth
1	Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha	3	4	2
2	Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR kewenangan pusat yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	4	4	4
3	Belum adanya standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN	1	3	2
4	Belum optimalnya pelayanan sistem KKPR oleh pemerintah daerah di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	5	4	5

Responden : Aci Prayarani, S.T., M.T

Jabatan : Koordinator SPR Wilayah IV (Penata Ruang Muda)

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth
1	Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha	2	2	2
2	Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR kewenangan pusat yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	3	3	3
3	Belum adanya standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN	1	1	1
4	Belum optimalnya pelayanan sistem KKPR oleh pemerintah daerah di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	5	4	4

*sudah  
dijurus*

Responden : May Arista Hasibuan, S.PWK

Jabatan : Konsultan Individu SPR Wilayah IV

No	Isu	Urgency	Seriousness	Growth
1	Belum optimalnya sistem OSS dalam mempercepat pengajuan permohonan KKPR kegiatan berusaha	3	3	2
2	Belum optimalnya pengajuan Persetujuan KKPR kewenangan pusat yang lolos validasi di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	4	4	4
3	Belum adanya standar prosedur penilaian KKPR di lingkup kerja Kementerian ATR/BPN	2	4	2
4	Belum optimalnya pelayanan sistem KKPR oleh pemerintah daerah di Wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua	5	5	4

# SURAT AUDIENSI PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG



## KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

Nomor : 170/UND-200-11-PF-01/VII/2022 Jakarta, 11 Juli 2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Audiensi Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dengan Pemerintah Kabupaten Badung

Yth.

**(Daftar Undangan Terlampir)**

di Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Nomor 067/4812/SETDA/PUPR tanggal 8 Juli 2022 perihal Mohon Konsultasi, maka dengan ini kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri audiensi yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 13 Juli 2022  
Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Hotel GranDhika Iskandarsyah  
Jl. Iskandarsyah Raya No. 65, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan 12160

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu untuk dapat memberikan informasi yang diperlukan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Subdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah II, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang melalui narahubung Sdri. Ifni 085-643-568-560 dan/atau 021-7226577.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang  
Direktur Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang,



Dr. Eko Budi Kurniawan, S.T., M.Sc  
NIP. 197111051997031001

Tembusan:

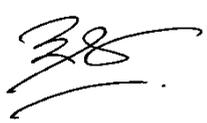
Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang

# LAPORAN MINGGUAN

## Minggu Ke-1

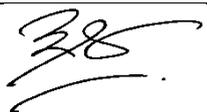
### Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

#### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> Tahapan 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi Pelayanan</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Kompeten</li> <li>4. Harmonis</li> <li>5. Loyal</li> <li>6. Adaptif</li> <li>7. Kolaboratif</li> </ol> Tahapan 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Harmonis</li> <li>4. Loyal</li> <li>5. Adaptif</li> <li>6. Kolaboratif</li> </ol>		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> </ul>		

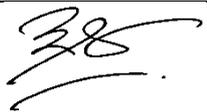
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terpercaya</b></li> </ul> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah		

## Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR</li> <li>Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> Tahapan 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>Berorientasi Pelayanan</li> <li>Akuntabel</li> <li>Kompeten</li> <li>Harmonis</li> <li>Loyal</li> <li>Adaptif</li> <li>Kolaboratif</li> </ol> Tahapan 2: <ol style="list-style-type: none"> <li>Akuntabel</li> <li>Kompeten</li> <li>Harmonis</li> <li>Loyal</li> <li>Adaptif</li> <li>Kolaboratif</li> </ol>		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Melayani</b></li> </ul> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Profesional</b></li> </ul> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Terpercaya</b></li> </ul>		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah		

### Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>		
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>Tahapan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi Pelayanan</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Kompeten</li> <li>4. Harmonis</li> <li>5. Loyal</li> <li>6. Adaptif</li> <li>7. Kolaboratif</li> </ol> <p>Tahapan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Harmonis</li> <li>4. Loyal</li> <li>5. Adaptif</li> <li>6. Kolaboratif</li> </ol>		
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul>		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah		

## Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam validasi KKPR</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>Tahapan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi Pelayanan</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Kompeten</li> <li>4. Harmonis</li> <li>5. Loyal</li> <li>6. Adaptif</li> <li>7. Kolaboratif</li> </ol> <p>Tahapan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Harmonis</li> <li>4. Loyal</li> <li>5. Adaptif</li> <li>6. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk</li> </ul>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p>dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		

## Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>Tahapan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi Pelayanan</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Kompeten</li> <li>4. Harmonis</li> <li>5. Loyal</li> <li>6. Adaptif</li> <li>7. Kolaboratif</li> </ol> <p>Tahapan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Harmonis</li> <li>4. Loyal</li> <li>5. Adaptif</li> <li>6. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p>dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		

### Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

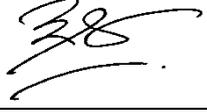
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian kebutuhan pemerintah di daerah dalam penilaian KKPR</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dalam rangka menyusun konten pembinaan</li> </ol>	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>Tahapan 1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berorientasi Pelayanan</li> <li>2. Akuntabel</li> <li>3. Kompeten</li> <li>4. Harmonis</li> <li>5. Loyal</li> <li>6. Adaptif</li> <li>7. Kolaboratif</li> </ol> <p>Tahapan 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Akuntabel</li> <li>8. Kompeten</li> <li>9. Harmonis</li> <li>10. Loyal</li> <li>11. Adaptif</li> <li>12. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk</p>		Minggu, 4 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p>dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		

## Minggu Ke-2

### Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

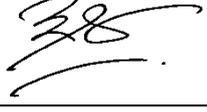
#### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah</p>		
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah</p>		
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Berorientasi Pelayanan</li> <li>9. Akuntabel</li> <li>10. Kompeten</li> <li>11. Harmonis</li> <li>12. Loyal</li> <li>13. Adaptif</li> <li>14. Kolaboratif</li> </ol>		
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		

**Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah</p>		
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>8. Berorientasi Pelayanan 9. Akuntabel 10. Kompeten 11. Harmonis 12. Loyal 13. Adaptif 14. Kolaboratif</p>		
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

**Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah**

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah</p>		
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 8. Berorientasi Pelayanan 9. Akuntabel 10. Kompeten 11. Harmonis 12. Loyal 13. Adaptif 14. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

## Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 8. Berorientasi Pelayanan 9. Akuntabel 10. Kompeten 11. Harmonis 12. Loyal 13. Adaptif		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
14. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

## Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Berorientasi Pelayanan</li> <li>9. Akuntabel</li> <li>10. Kompeten</li> <li>11. Harmonis</li> <li>12. Loyal</li> <li>13. Adaptif</li> <li>14. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul>		Minggu, 11 September 2022

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		melalui personal chat <i>whatsApp</i>

### Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>Menyusun konten pembinaan yang perlu disampaikan ke pemerintah daerah</p>	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah</p>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Berorientasi Pelayanan</li> <li>9. Akuntabel</li> <li>10. Kompeten</li> <li>11. Harmonis</li> <li>12. Loyal</li> <li>13. Adaptif</li> <li>14. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul>		Minggu, 11 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah		

### Minggu Ke-3

#### Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

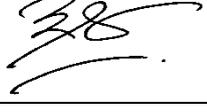
##### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan</p>		
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah</p>		
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis 18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif</p>		
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

##### Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b> konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis 18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b>                Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b>                Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b>                Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

### Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b> konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

#### Kegiatan 4. Pembuatan konten digital untuk pembinaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b>  Reduksi informasi untuk dimasukan ke konten digital		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Output akhir: video		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Loyal</li> <li>4. Adaptif</li> <li>5. Kolaboratif</li> </ol>		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul>		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</p>		

## Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

### Kegiatan 1. Kajian konten pembinaan proses validasi KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<p><b>Tahapan Kegiatan:</b></p> <p>konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan</p>	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b></p> <p>Draft konten pembinaan validasi KKPR di daerah</p>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b></p> <p>15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis 18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif</p>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b></p> <p>Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.</p>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<p><b>Penguatan Nilai Organisasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Profesional</b></li> </ul> <p>Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Terpercaya</b></li> </ul>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah		

### Kegiatan 2. Kajian konten pembinaan proses penilaian KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis 18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

### Kegiatan 3. Kajian konten pembinaan proses penerbitan KKPR di daerah

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> konfirmasi dengan koordinator subdit terkait konten pembinaan	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Draft konten penilaian validasi KKPR di daerah		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> 15. Akuntabel 16. Kompeten 17. Harmonis 18. Loyal 19. Adaptif 20. Kolaboratif		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b>                Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b>                Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b>                Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

#### Kegiatan 4. Pembuatan konten digital untuk pembinaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> Reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Output akhir: video		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntabel</li> <li>2. Kompeten</li> <li>3. Loyal</li> <li>4. Adaptif</li> <li>5. Kolaboratif</li> </ol>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		Minggu, 18 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

### Minggu Ke-4

#### Kartu Bimbingan Aktualisasi Mentor

##### Kegiatan 1. Pembuatan konten digital untuk pembinaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
<b>Tahapan Kegiatan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital</li> <li>2. Pembuatan konten video</li> </ol>		
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Video		
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b>  Tahapan 1: <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Akuntabel</li> <li>7. Kompeten</li> </ol>		

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
8. Loyal 9. Adaptif 10. Kolaboratif  Tahapan 2: 1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Loyal 5. Adaptif 6. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		

## Kartu Bimbingan Aktualisasi Coach

### Kegiatan 1. Pembuatan konten digital untuk pembinaan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
<b>Tahapan Kegiatan:</b> 1. Reduksi informasi untuk dimasukkan ke konten digital 2. Pembuatan konten video	Konsultasi dengan coach terkait kegiatan dan tahapan kegiatan	Minggu, 25 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Output Kegiatan terhadap Pemecahan Isu:</b> Video		Minggu, 25 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Keterkaitan dengan Substansi Mata Pelatihan:</b>  Tahapan 1: 1. Akuntabel		Minggu, 25 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Coach	Waktu dan Media Coaching
2. Kompeten 3. Loyal 4. Adaptif 5. Kolaboratif  Tahapan 2: 1. Berorientasi Pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Loyal 5. Adaptif 6. Kolaboratif		
<b>Kontribusi terhadap visi-misi organisasi:</b> Kegiatan ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan misi dari Kementerian ATR/BPN RI yaitu “Menyelenggarakan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, serta tujuan organisasi “Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.		Minggu, 25 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>
<b>Penguatan Nilai Organisasi:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Melayani</b> Kegiatan ini merupakan proses peningkatan pelayanan KKPR di daerah yang didorong oleh kegiatan pembinaan pemerintah pusat</li> <li>• <b>Profesional</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelaksanaan tugas Kementerian ATR/BPN untuk dapat mampu melayani masyarakat dalam konteks permohonan KKPR di daerah</li> <li>• <b>Terpercaya</b> Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas pelayanan yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN di daerah</li> </ul>		Minggu, 25 September 2022 melalui personal chat <i>whatsApp</i>

## BIODATA PENULIS



Taufik Hidayat, lahir di Cimahi pada tanggal 02 November 1993. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Islam Al Husna Kota Bekasi pada tahun 1999-2005, SMP Negeri 1 Kota Bekasi tahun 2005-2008, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Bekasi pada tahun 2008-2011. Penulis menamatkan pendidikan sarjana dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011-2015, kemudian melanjutkan ke jenjang magister jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota di Institut Teknologi Bandung pada tahun 2019-2021.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 133.1/SK-100.KP.03.01/IV/2022 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2021 tanggal 1 April 2022, terhitung sejak tanggal 1 April 2022, penulis diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan sebagai ahli pertama penata ruang pada Subdirektorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV, Direktorat Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang.